



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan: C00201704948, 08 November 2017
- II. Pencipta  
Nama: Dr. NUR KHOLISOH, M.Si.  
Alamat: Tebet Barat Dalam VII E/26 Rt.006 Rw.006  
Kec. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.  
Kewarganegaraan: Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama: UNIVERSITAS MERCU BUANA  
Alamat: Jalan Meruya Selatan No.1  
Kembangan, Jakarta Barat 11650.  
Kewarganegaraan: Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan: Buku
- V. Judul Ciptaan: DEMOKRASI KOK REPOT (RETORIKA POLITIK GUS DUR DALAM PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA)
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia: 01 Februari 2012, di Jakarta
- VII. Jangka waktu perlindungan: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan: 090088

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

dan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Dan  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Duam Lita Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIRN 06003181991032001

Dr. Nur Kholisoh, M.Si



**Kata Pengantar :**  
**Ir. Salahuddin Wahid**  
**Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ**

# **DEMOKRASI AJA KOK REPOT**

**Retorika Politik Gus Dur dalam  
Proses Demokrasi di Indonesia**



# DEMOKRASI AJA KOK REPOT

Retorika Politik Gus Dur dalam  
Proses Demokrasi di Indonesia



Dr. Nur Kholisoh, M.Si

**Kata Pengantar :**  
**Ir. Salahuddin Wahid**  
**Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ**



demokrasi mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya selama masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Sedangkan hasil analisis terhadap *dramatistic pentad* dari retorika politik Gus Dur menunjukkan bahwa selama era Orde Baru terdapat dua belas peristiwa penting yang menjadi panggung drama (*scene*) Gus Dur sebagai seorang aktor (*agent*) dalam menyampaikan ide-ide dan gagasannya (*act*) melalui berbagai cara atau strategi (*agency*) dengan tujuan (*purpose*) untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun Gus Dur melakukan strategi (*agency*) yang berbeda-beda dalam setiap *scene* yang dimainkannya, namun sesungguhnya dapat ditarik satu benang merah yang mengarah pada tujuan (*purpose*) yang sama yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis.

## Pengantar Penulis

Buku yang sedang anda baca ini berasal dari disertasi doktoral Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul: *Dramatistic Pentad: Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia*. Penulis melihat ketokohan Gus Dur sebagai seorang komunikator politik, patut dijadikan kajian yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu komunikasi politik.

Penulis menyadari betul bahwa proses penyelesaian buku ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik berupa pemikiran, dorongan, semangat serta saran dan sumbangsih lainnya, baik berupa material maupaun immaterial, yang tentunya tidak dapat dinilai maupun diukur dengan apapun. Untuk itu, maka perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan salam ta'dzim kepada Ir. Salahuddin Wahid (Gus Solah), yang telah berkenan memberikan kata pengantar untuk buku ini dan mengizinkan penulis untuk melakukan peluncuran perdana buku ini di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang dipimpinnya. Selain itu, penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Mudji Sutrisno SJ (Romo Mudji) yang telah berkenan memberikan kata pengantar yang begitu komprehensif, sehingga memberi warna tersendiri bagi buku ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankan pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada para penulis testimoni, yaitu: Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A (Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan), Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum PP Muslimat NU dan Menteri Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Reformasi), Zuhairi Misrawi (Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Ketua *Moderate Muslim Society*), Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., MM (Pemrakarsa Lokakarya Nasional Indonesia Menulis dan Pemegang rekor MURI bidang penulisan), dan Dr. H. Samsul Ma'arif, MA (Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU).

Selain itu, penulis pun menyadari bahwa terwujudnya buku ini juga tidak terlepas dari peran serta sumbangsih para nara sumber yang telah berbagi pengalaman hidupnya bersama Gus Dur sebagai bagian dari sejarah yang dituturkan secara *oral history* dalam buku ini. Untuk itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada: Franz Magnis Suseno (Romo Magnis), K.H. Said Aqil Siraj, H. Slamet Effendi Yusuf, Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si, dr. H. Umar Wahid, Hj. Khofifah Indar Parawansa, Ulil Abshar Abdalla, H. Ahmad Subagdja, H. Chozin Chumaidy, Bondan Goenawan, dan Al-Zastrouw Ng.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung juga penulis haturkan kepada Mas Miftah (Miftahuddin) yang telah banyak membantu penulis dalam mengedit buku ini dari format ilmiah sebuah disertasi menjadi format buku yang lebih populer serta memberikan saran dan masukan yang berharga bagi penyempurnaan buku ini. Khusus untuk Dr. Antonius Hari Kustono, Pr (Romo Hari), penulis menghaturkan terima kasih atas lukisan 'Gus Dur' hasil karya Romo yang digunakan sebagai cover buku ini.

Untuk ibunda, ayah, dan mama tercinta serta semua kakak-kakak serta adik-adik tersayang, penulis haturkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terakhir dan yang paling penting dalam hidup penulis, yaitu suamiku terkasih, Arman, dan kedua buah cinta kami, Arlis dan Putra, terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta dan kasih sayang serta pengertian yang selalu tercurah selama penyelesaian buku ini. Semoga, semua ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiin..

# **Pengantar: Satu-Satunya Lawan Politik Pak Harto**

**Oleh: Ir. H. Salahuddin Wahid**

(Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang)

Buku tentang Gus Dur sudah banyak sekali diterbitkan dan akan terus bertambah karena memang sosok Gus Dur amat menarik untuk dikaji dan tampaknya tidak akan pernah habis walau sudah digali oleh banyak orang. Gus Dur bisa disejajarkan dengan Bung Karno dan Pak Harto dalam hal ketokohan di samping sebagai obyek penulisan buku yang diambil dari berbagai tema, baik tema politik maupun sosial kemasyarakatan. Buku ini mengambil tema yang belum banyak digali oleh penulis lain, yaitu mengenai ihwal retorika politik Gus Dur. Bagi pengagum Gus Dur maupun pelaku politik, buku ini amat menarik untuk dibaca. Buku yang berjudul "Demokrasi Aja Kok Repot" ini, menguraikan sejumlah kegiatan Gus Dur yang merupakan kegiatan komunikasi dan jelas amat berpengaruh terhadap keberhasilan dan pemunculan Gus Dur sebagai tokoh utama masyarakat sipil yang pada ujungnya akan bermuara pada pemunculan Gus Dur menjadi Presiden RI ke 4.

Buku yang menarik ini melakukan kajian terhadap retorika politik Gus Dur dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu sejak kembalinya Gus Dur ke Indonesia dari kuliah di luar negeri sampai menjelang Gus Dur menjabat sebagai Presiden.



Selain itu, buku ini juga membahas 12 (dua belas) peristiwa yang dapat dianggap sebagai panggung dari retorika politik Gus Dur. Panggung itu ada yang diciptakan sendiri oleh Gus Dur, tetapi ada juga diciptakan oleh pihak lain yang kemudian oleh Gus Dur dimanfaatkan dengan baik. Salah satu panggung yang cukup menarik yang juga ditampilkan dalam buku ini adalah langkah Gus Dur mengajak Mbak Tutut silaturahmi ke beberapa pesantren dan komunitas santri, pada tahun 1997. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya dituju oleh Gus Dur dengan langkah itu. Namun sesungguhnya, pada tahun 1993 ada pemikiran dan gagasan dari beberapa aktivis Forum Demokrasi – entah itu hanya pikiran sekelompok aktivis atau kebijakan resmi Fordem – untuk bisa mengangkat Gus Dur sebagai Wakil Presiden. Pemikiran ini cukup beralasan, karena walaupun Gus Dur bukan ketua parpol atau pimpinan lembaga negara apa pun, tetapi jelas bahwa Gus Dur sejak lama telah menjadi salah satu pemain utama di dunia politik Indonesia. Oleh karena itu, menurut Prof. Dr. Salim Said pada tahun 1990-an, lawan politik Pak Harto di Indonesia hanya Gus Dur. Perlu dicatat pula bahwa pada pertengahan 1990-an ada survey yang tidak dipublikasikan yang menunjukkan bahwa pemimpin bagi masyarakat di Indonesia selain Pak Harto adalah Megawati dan Gus Dur.

Sejak 1973 Gus Dur sudah mulai tampil di berbagai tempat sebagai pembicara atau *muballigh* di Jawa Timur khususnya Jombang dan sekitarnya. Gus Dur punya kemampuan berbicara yang hebat. Mampu berbicara dengan baik di depan publik mulai dari tingkat “akar rumput” hingga tingkat internasional. Bisa berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat bawah dan juga masyarakat atas. Pidatonya pasti memikat diselingi humor cerdas tetapi substansinya bernas. Kegiatan berdakwah di lapisan “akar-rumput” itu dijalaninya

selama sekitar 25 tahun. Tentu kegiatan itu membuat Gus Dur dikenal secara langsung oleh jutaan warga bangsa di seluruh Indonesia. Saya pernah mendengar cerita langsung dari seorang kawan di Sumenep, Madura, bagaimana ribuan warga masyarakat bersedia menunggu Gus Dur tiba di tempat acara pada pukul dua pagi. Lalu mendengarkan pengajian selama 1 jam, baru pulang ke rumah. Saya juga mendengar kisah lucu tentang bagaimana kelompok pengundang membajak Gus Dur di Bandara Juanda lalu dibawa ke tempat yang tidak dijadwalkan, baru setelah itu Gus Dur diantar ke tempat dimana seharusnya Gus Dur tampil. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau dalam satu hari Gus Dur bisa tampil di beberapa tempat, dari pagi sampai malam. Salah satu hal yang juga luar biasa dari Gus Dur ialah daya tahan fisik Gus Dur yang prima untuk bisa hadir di beberapa tempat dalam waktu yang relatif singkat.

Setamat SD, Gus Dur pernah menjadi juara menulis di Jakarta. Jadi, Gus Dur memang punya bakat menulis. Tulisan Gus Dur di media pada akhir tahun 1970-an sampai akhir 1980-an amat banyak dan dibaca oleh kalangan yang luas. Topiknya menarik, ditulis dengan judul dan gaya tulisan juga yang menarik. Tulisannya ringkas dan padat. Tulisan-tulisan Gus Dur di majalah Tempo telah dibukukan. Tulisan di berbagai media itu dibuat ditengah kesibukan berkeliling ke berbagai tempat untuk memberi ceramah atau pengajian.

Tidak banyak tokoh yang fasih berbicara bahasa Inggris dan Arab dengan lancar. Gus Dur, Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Alwi Shihab adalah contoh dari yang sedikit itu. Saya mendengar cerita dari seseorang yang mengundang Gus Dur untuk berbicara di depan hadirin yang berbahasa Inggris. Waktu itu Gus Dur belum dikenal banyak orang. Orang itu deg-degan dan bertanya dalam hati, apakah Gus Dur bisa bicara

dalam bahasa Inggris dengan baik. Tetapi begitu mendengar Gus Dur bicara, dia sungguh heran terhadap kefasihan Gus Dur berbahasa Inggris termasuk dalam menyelipkan humor. Gus Dur juga termasuk sedikit orang yang punya kemampuan tinggi dalam menulis dan berbicara di depan publik. Cak Nur hebat dalam menulis tetapi sebagai pembicara kurang menarik, tidak banyak humor. Sulit bagi Cak Nur untuk bisa tampil sebagai pembicara di depan khalayak kalangan "akar-rumput". Tokoh lain yang sama baiknya dalam bicara dan menulis adalah KH. Mustofa Bisri dan Emha Ainun Najib. Tetapi produktifitasnya masih kurang dibanding Gus Dur.

Gus Dur punya intuisi politik yang halus. Kemampuan membaca situasi dan kecenderungan ke depan yang dimiliki Gus Dur juga amat tinggi. Selain itu, Gus Dur juga memiliki kemampuan untuk menentukan langkah dan melontarkan retorika yang tepat di dalam mengantisipasi situasi itu. Saya ambil sebagai contoh ialah Rapat Akbar dan Istighotsah NU di Senayan pada tahun 1992. Saat itu saya dihubungi oleh banyak kawan di PBNU dan Ansor yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap gagasan Gus Dur tentang Rapat Akbar itu. Beberapa kali saya hadir dalam pertemuan di kantor dr Fahmi Saifuddin MPH -salah seorang Ketua PBNU- di Jalan Proklamasi. Di dalam pertemuan itu dibahas apa dampak negatif dan positif dari Rapat Akbar itu. Kebanyakan memberi catatan dampak negatif. Tapi Gus Dur sama sekali tidak memberi perhatian terhadap penolakan itu. Ternyata analisis Gus Dur lebih tepat dan Rapat Akbar itu menjadi salah satu manuver politik yang jitu. Tidak semua tokoh politik mampu membaca situasi dan kecenderungan yang akan terjadi lalu mengantisipasinya.

Saya ingin menyinggung satu panggung lagi yang diangkat oleh Dr. Nur Kholisoh yaitu Mukhtar NU ke 29 di Cipasung pada 1994. Kita tentu masih ingat bahwa Pak Harto tidak ingin

Gus Dur terpilih lagi sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Dengan cara mentah Pak Harto menunjukkan ketidaksukaan terhadap Gus Dur, dengan cara tidak menyalami Gus Dur padahal yang lain disalami. Kita tahu bahwa campur tangan pemerintah untuk mencegah Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU tidak berhasil. Saya termasuk kelompok yang tidak mendukung Gus Dur menjadi Ketua Umum lagi dengan alasan yang amat berbeda. Kelompok kami mendukung dr Fahmi Saifuddin untuk menjadi Ketua Umum Tanfiziyah PBNU. Menurut kami posisi yang pas untuk Gus Dur ialah Rais Aam atau Wakil Rais Aam Syuriah PBNU.

Ada tiga pertimbangan yang saya lontarkan untuk tidak memilih Gus Dur sebagai Ketua Umum. Pertama, kalau Gus Dur terpilih lagi untuk kali ketiga, NU akan sangat tergantung pada Gus Dur. Kedua, Gus Dur bukan jenis pekerja (eksekutif) tetapi jenis pemikir yang lebih fokus pada visi ke depan. Yang tepat ialah di Syuriah, bukan di Tanfidziyah. Ketiga, Gus Dur adalah pemimpin yang paling berpengaruh di dalam jam'iyah NU. Berilah Gus Dur posisi yang paling berpengaruh, yaitu di posisi Rais Aam atau Wakil Rais Aam Syuriah PBNU. Saat itu saya yakin betul pada argumentasi saya, yang rasional. Pikiran itu telah dikomunikasikan kepada Gus Dur dan ditolak oleh Gus Dur dengan argumentasi yang menurut saya dicari-cari. Tetapi kini saya pikir bahwa keputusan Gus Dur untuk bersikeras menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU adalah keputusan yang tepat. Pada saat itu Gus Dur berpikir secara politis. Bahwa kalau dia tidak menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, maka NU telah dikooptasi oleh Pak Harto. Itu harus dilawan. Dan kita tahu bahwa setelah itu Gus Dur menjadi tokoh utama masyarakat sipil Indonesia. Serangan stroke pada awal 1998 tidak banyak mengurangi ketokohan itu. Amien Rais yang menjadi tokoh utama gerakan Reformasi

belum mampu menggeser Gus Dur dari posisi tersebut. Karena itu Amien Rais mau tidak mau terpaksa mengusung Gus Dur sebagai calon presiden pada SU MPR 1999.

Serangan stroke pada 1998 itu banyak mengurangi kemampuan Gus Dur sehingga saat menjabat sebagai Presiden ke 4, Gus Dur banyak melakukan kesalahan langkah. Paling parah ialah ketidakmampuan Gus Dur membangun komunikasi dengan partai pendukung. Retorika politik Gus Dur saat menjabat Presiden adakalanya berhasil, seperti memberhentikan Wiranto saat berada di luar negeri dan sikap terhadap warga Papua. Juga saat memberi izin kembali untuk peringatan Imlek. Tetapi komunikasi politik dengan parpol serta DPR yang kurang baik dan adanya retorika politik yang kurang tepat -pencabutan TAP MPRS No XXV Tahun 1966- membuat posisi Gus Dur tidak stabil. Gus Dur juga tampak kurang memahami bahwa sistem pemerintahan kita itu bukan presidensiil penuh, tetapi semi presidensiil. Artinya MPR punya wewenang memberhentikan. Selain itu, Retorika politik terhadap TNI yang juga kurang baik, membuat posisinya kian lemah. Di dalam Polri bahkan ada sedikit gesekan internal. Kalau Bung Karno didukung TNI dan Polri saat mengeluarkan Dekrit 1959, Gus Dur tidak didukung TNI dan Polri saat mengeluarkan Dekrit 2001. Salah satu kesalahan lain Gus Dur ialah memilih Megawati sebagai Wakil Presiden. Kalau yang dipilih adalah Wiranto atau yang lain, tidak mungkin ada pelengseran terhadap Gus Dur.

Salah satu fakta lain yang menarik namun belum banyak dikaji ialah bahwa banyak kader yang telah dibina Gus Dur akhirnya banyak yang mbalelo atau melawan Gus Dur. Gus Dur punya ketajaman dalam memilih kader yang punya kemampuan dalam pemikiran dan retorika, tetapi ada kekurangan di dalam menilai karakter kader tersebut. Karakter yang



diberi banyak perhatian oleh Gus Dur ialah keberanian, tetapi integritas kurang. Saya masih ingat bahwa banyak ulama menolak pilihan Gus Dur terhadap Matori untuk menjadi Ketua Umum Tanfidz DPP PKB. Gus Dur menjawab, memang dibutuhkan orang seperti Mathori yang berani dan sedikit “urik” untuk memimpin PKB.

Kader Gus Dur yang paling awal mbalelo ialah Mathori Abdul Jalil, lalu kedua ialah Saifullah Yusuf, yang ketiga Hasyim Muzadi, sedangkan yang keempat Alwi Shihab, dan kelima Khofifah serta terakhir ialah Muhaimin Iskandar. Terakhir Khofifah sudah mendekat lagi dan hampir pulih hubungannya. Yang lain walau sudah tidak berlawanan, kecuali Muhaimin Iskandar, hubungan mereka dengan Gus Dur tidak bisa pulih. Oleh karena itu, menurut saya, perlu ada kajian terhadap masalah ini sebagai bagian dari upaya untuk mempelajari kepemimpinan dan komunikasi Gus Dur. Bagaimana pun, terlepas dari pro dan kontra, Gus Dur adalah sebuah buku tebal yang mengandung berbagai pelajaran. Gus Dur telah memberi sumbangsih besar bagi bangsa Indonesia dalam banyak hal.

Yang selama ini banyak dikaji ialah di dalam masalah pemikiran keagamaan, politik, komunikasi, budaya, ekonomi. Yang perlu kita galakkan ialah kajian tentang kepemimpinan Gus Dur, kelebihan dan kekurangannya. Tak ada gading yang tak retak. Jadi kalau dalam kajian itu muncul aspek negatif Gus Dur, hal itu menunjukkan bahwa Gus Dur adalah manusia biasa. Kelemahan itu tidak mengurangi kebesaran Gus Dur. Kebesaran Gus Dur sudah diakui oleh banyak pihak, bahkan setelah tidak menjadi apa-apa. Setelah tidak menjadi Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB, pengaruh Gus Dur tidak berkurang.

Kebesaran itu makin terlihat saat dan setelah beliau wafat. Kediaman Gus Dur penuh sesak oleh pelayat, jalan menuju Ciganjur macet luar biasa. Jalan dari Ciganjur ke Bandara Halim dan dari Bandara Juanda ke Tebuireng dipenuhi oleh

warga masyarakat yang ingin memberi penghormatan terakhir. Upacara pemakaman di kompleks Pesantren Tebuireng disesaki oleh puluhan orang. Upacara tujuh hari, 40 hari dan 100 hari dipenuhi oleh para pengikut Gus Dur yang datang dari berbagai tempat, termasuk yang jaraknya lebih dari seratus kilometer.

Setelah 100 hari ternyata jumlah peziarah tidak berkurang dan tetap seperti itu sampai saat ini. Pada hari biasa peziarah mencapai sekitar 2.000 orang dan pada hari libur mencapai sekitar 7.000 orang. Dalam setahun jumlah peziarah bisa melebihi angka 1 juta. Peziarah itu termasuk umat agama lain. Untuk menampung begitu banyak kendaraan yang mengangkut peziarah, Presiden menerima usul Pesantren Tebuireng untuk membangun fasilitas tempat parkir. Di dalam tempat parkir itu akan dibangun tempat istirahat supir, kios, warung, mesjid kecil. Syukur alhamdulillah, saya berhasil meyakinkan pemerintah untuk membangun Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari. Di dalam Museum itu akan bisa ditampilkan kisah perjuangan para ulama Indonesia dalam ikut mendirikan negara RI dan juga mempertahankan kemerdekaan RI saat terancam oleh pihak luar negeri dan dalam negeri. Dengan mengetahui informasi tentang perjuangan para ulama itu, maka tudingan banyak pihak yang mengatakan bahwa negara RI berdasar Pancasila ini adalah negara *thoghut*, akan dapat kita bantah.

**Pengantar kecil buku**  
**Dr. Nur Kholisoh**  
**“Demokrasi aja kok repot”-nya Gus Dur**

Oleh: Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ  
Budayawan

1). Ketika tokoh yang lebih pas digelar tulus sebagai “guru bangsa” bernama Gus Dur dikenang, diwacanakan, ditulis dan terlebih dipelajari “ilmunya yang paling ia hayati” dalam soal kemajemukan keIndonesiaan dan proses demokrasi, maka yang terjadi sesungguhnya adalah semakin terbukalah sisi-sisi multi dimensi pemikirannya; aksinya dan konsistensinya untuk mewariskan ke kita semua apa itu makna pluralitas kemajemukan bangsa Indonesia dan apa itu format yang paling tepat secara politis dalam menghidupi kemajemukan itu yaitu demokrasi. Buku Dr. Nur Kholisoh sebagai garapan disertai ilmu komunikasi politik dengan bingkai “amat ilmiah” lantaran menaruh retorika politik Gus Dur sebagai kaji dan penempatan nya sebagai “aktor” penyampai ide dan pejuang demokrasi dalam dua belas peristiwa penting “panggung politik Gus Dur”, bagi saya menjadi sumbangan berharga untuk khasanah pustaka seorang Guru Bangsa dalam bingkai komunikasi politik yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Sebagai seorang yang dekat dengan Gus Dur, bahkan dokumentasi bersamanya di istana semasa menjadi Presiden saya miliki paling lengkap, ketika Dr Nur meminta saya menulis catatan ini, tepatlah terngiang dan muncul

kembali ingatan hidup bersama Gus Dur. Dalam buku editor Moh. Sobary ketika ia masih menjadi direktur kantor berita Antara berjudul "Istana untuk rakyat", saat itu saya menulis untuk epilog, bahwa Gusdur paling tepat berposisi sebagai Guru Bangsa. Mengapa? Menjadi presiden menyempitkan panggungnya sebagai pendidik bangsa lantaran pasti akan bergulat dengan intrik politik dan politik kekuasaan yang ia sendiri ingin mengatur proses demokrasi politik yang beretika. Gus Dur menolak demokrasi seolah-olah yang sejatinya dimonopoli dengan hegemoni tunggalnya Soeharto. Maka kebhinekaan yang mau disatu-satukan dan diseragamkan ia lawan juga ketika penyederhanaan partai-partai politik dalam tiga partai besar. Dan cara Gus Dur "melawannya" dengan tetap menjunjung kebhinekaan yang berdasar Panca Sila. Di sini secara jernih kita membaca mengapa Gus Dur sigab dan memberi contoh untuk azas tunggal Panca Sila karena tafsir Gus Dur lebih luas dari politik yang adu kekuasaan dan melampauinya dalam dan dengan raanah kebudayaan.

2). Catatan pertama, analisis dengan penelitian posisi retorika Gus Dur dengan penelitian pustaka tulis maupun wawancara sumber dekat serta dua belas peristiwa panggung politik retorik memang secara pasti "mampu memotret model komunikasi politik demokrat sekaliber Gus Dur". Namun, potret ini sebenarnya menampilkan "apa yang kaya dan penuh nuansa di balik panggung retorika itu sendiri". Artinya, keberanian Gus Dur secara politis menetapkan hari raya imlek dan mengakui Kon Fucianisme sebagai bagian dari penyusun kebhinekaan Indonesia dari sesama anak bangsa keturunan Cina, tentu tidak akan tersurat eksplisit dalam retorika ini lantaran keketaan metodologi ilmu komunikasi politik ini. Pula, ketika politik kebudayaan yang dengan tegas dimana-mana dilakoni dan diteladankan Gus Dur bahwa

sesama anak bangsa yang saling berbeda agama itu bedanya hanya dalam "religi" sebab dalam religiositas dan keimanan itu "satu". Ia selalu mencontohkannya dengan alm romo Mangunwijaya dan dirinya (baca Gus Dur) itu beda agama namun satu keimanan atau religiositas. Pokok ini tentu saja tidak akan muncul eksplisit dalam penelitian buku ini meski bingkainya adalah "demokrasi". Juga demokratisasi kultural dalam pengertian "pribumisasi Islam di Indonesia" dan "dialog-dialog lintas agama dalam ranah budaya politik dan politik budaya", dalam buku ini ditunjuk celah penelitian lebih jauh untuk digarap karena dua belas peristiwa panggung politik itu jelas-jelas menunjuk ke soal-soal ini, misalnya, kasus polling majalah monitor dimana Gus Dur membela "korban" dan menjunjung kebhinekaan, peristiwa reformasi; penyerangan kantor DPP PDI 27 juli 1996.

3). Yang menonjol dari buku Dr Nur Kholisoh ini (saya belajar dari dalamnya) adalah data peristiwa politik sebagai panggung retorika dimana "kebenaran sejarah" itu ada baik di wacana (retorika) maupun ketika retorika ini ditulis. Di sini, Michel Foucault, dengan genealogi pengetahuan dan asal usul serta posisi kekuasaan serta diskusi tentang kapan sebuah kebenaran itu tampil, dapat sudah mulai dalam wacana dan dalam relasi kekuasaan yang oleh Jacques Lacan yang meneliti bahasa sebagai ungkap kehadiran sadar maupun tak sadar menjadi menarik saat dibaca dari buku Retorika Gus Dur "demokrasi aja kok repot". Menariknya lagi, Dr Nur (mungkin tanpa sadar atau sadar sesadar-sadarnya) dengan menjudulkannya "Demokrasi aja kok repot" sudah langsung memuat diskursus betapa wacana kebenaran itu sudah mulai hadir dalam retorika dan diskursus dan ketika ditulis akan memunculkan pertanyaan kritis: siapa



dan dengan kepentingan apa ia menyajikannya ke publik? Jelas Sdri Nur Kholisoh kepentingannya adalah pencerahan, pendidikan keadaban buat Indonesia yang majemuk suku, agama ini bila mau menghayati konsekuen format politik warisan pendiri bangsa yang diteladankan oleh Gus Dur dalam demokrasi. Maka meski banyak sumber menyebut kejadian aslinya, toh untuk saya, tampilan foto bersejaarah hari terakhir Gus Dur di istana yang "hanya bercelana pendek" tetaplah sebuah keteladanan yang mau bilang "turun dari kepresidenan demi memberi contoh sebagai guru bangsa soal demikrasi saja kok repot".

4). Kesimpulan penelitian disertasi yang jadi buku ini di bab penutup semakin menjadi penegasan dan pengukuhan bahwa pemikiran Gus Dur melampaui zaman atau lebih tepat mendahului seumumnya orang-orang sebangsa berpikirknya dan pembacaan tanda-tanda jaman yang cermat selalu akan menggugah kita mengapa ia visioner dan tepat baca tanda jaman? Jawabnya, karena Gus Dur mengolah pengalamannya ke pelosok-pelosok rakyat kecil dan dekat di hati dan derita rakyat banyak, lalu mengolahnya dalam hening religiositas seorang nahdhliyin dalam Dia yang republik Indonesia diyakini merdekanya karena rahmat dan berkatNYA. Anda akan menikmati, keketatan sistematisasi pikiran buku ini namun sekaligus anda mesti kreatif memasukkan imajinasi Anda pada "panggung pertunjukkan atau tampilan yang anda sendiri simpulkan akan dramatiskah, tragiskah atau ironiskah? Ruang luas tafsir terbuka di hadapan Anda sebagai pembaca sebab, bukankah "membaca adalah kerja menafsirkan dan menghidupkan dengan makna dan arti "kalimat-kalimat dan kata-kata tertulis yang kalau tidak dihidupi akan mati sebagai huruf-dan huruf". Salam dan selamat membaca, proficiat pada Dr. Nur Kholisoh. jakarta, hari gong xi fa chai 23 januari 2012.

# Daftar Isi

ABSTRAK .....	iii
PENGANTAR PENULIS .....	v
PENGANTAR Oleh: Ir. H. Salahuddin Wahid., <i>Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang</i> .....	viii
PENGANTAR Oleh: Prof.dr. Mudji Sutrisno, SJ., <i>Budayawan</i> .....	xvi
BAB 1. Pendahuluan .....	1
A. Gus Dur dalam Rekam Jejak Sejarah NU .....	1
B. Biografi Gus Dur sebagai Dramatisme .....	22
BAB 2. Dramatistic Pentad Kenneth Burke: Sebuah Penghampiran Teoritis .....	27
A. Dramatisme sebagai kajian tindakan .....	27
B. Komunikasi Politik .....	29
C. Aktor Politik sebagai Komunikator Politik .....	35
D. Pembicaraan Politik .....	43
E. Demokrasi sebagai Wacana Politik .....	51
F. Bahasa, Simbol, dan Makna .....	68

G. Substansi, Identifikasi, Konsubstansialitas, dan Persuasi dalam Komunikasi .....	71
H. Konstruktivisme: Penghampiran Metodologis .....	77
BAB 3. Gus Dur: Sang Komunikator Politik Sejati .....	89
A. Komunikator Politik .....	89
B. Humor sebagai Sarana Komunikasi Politik .....	95
BAB 4. Agama, Pesantren, dan Demokrasi: Gagasan-Gagasan Gus Dur di Era 70-an .....	101
A. Peran Agama dalam Proses Demokrasi dan Pembangunan .....	107
B. Nilai-nilai Demokrasi dalam Pesantren .....	110
C. Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Pluralis .....	116
D. Orde Baru dan Hegemoni Kekuasaan .....	119
BAB 5. Demokrasi dan HAM: Gagasan-Gagasan Gus Dur di Era 1980-an .....	123
A. Nilai-nilai Demokrasi dalam Ideologi Negara dan Tafsiran Agama .....	125
B. Transformasi Nilai-nilai Agama dalam Kehidupan Sosial Masyarakat .....	136
C. Islam dan Pluralisme Agama dalam Negara Demokrasi .....	147
D. NU dan Partai Politik sebagai Basis Perjuangan Gus Dur .....	168
BAB 6. Strategi Politik Gus Dur dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Demokrasi di Era Tahun 1990-an .....	177
A. Simbolisasi Islam dalam Politik Orde Baru .....	178
B. Fordem sebagai Kekuatan Penyeimbang .....	191

C. Gus Dur <i>vis a vis</i> Soeharto .....	196
1. Rapat Akbar dan Kesetiaan pada Pancasila .....	198
2. Muktamar ke-29 NU di Cipasing .....	201
3. Tragedi 27 Juli 1996 .....	203
D. Strategi “Pemahaman Terbalik” .....	205
Bab 7. <i>Dramatistic Pentad</i> : Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia .....	209
KESIMPULAN: Mendobrak Kekuasaan Melalui Gagasan dan Retorika .....	239
DAFTAR PUSTAKA .....	247

# BAB 1

## Pendahuluan

### A. Gus Dur dalam Rekam Jejak Sejarah NU

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri pada 31 Januari 1926, merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Menurut Mujammil Qomar, dalam bukunya *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam* (Republika, 31 Januari 2010), sesungguhnya ada tiga orang tokoh ulama yang memainkan peran sangat penting dalam proses pendirian *jam'iyah* atau organisasi yang bernama NU. Ketiga orang itu adalah Kiai Wahab Chasbullah, Tambak Beras, Jombang; KH Hasyim Asy'ari (pendiri dan pembina Pondok Pesantren Tebuireng Jombang), dan Kiai Cholil (Bangkalan).

Menurut Qomar, ketiga tokoh tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses pendirian NU. Kiai Wahab sebagai pencetus ide pembentukan organisasi NU<sup>1</sup>, KH Hasyim Asy'ari sebagai pemegang kunci<sup>2</sup>, dan Kiai Cholil sebagai tokoh sentral

---

<sup>1</sup> Saat itu Kiai Wahab prihatin terhadap gejolak dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di tahun 1920-an, terutama yang berkaitan dengan praktik-praktik keagamaan, pendidikan dan politik. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap persoalan tersebut, Kiai Wahab membentuk kelompok diskusi *Tashwirul Afkar* (potret pemikiran) pada tahun 1924. Pada perkembangannya, dari kelompok diskusi ini kemudian muncul gagasan tentang pendirian *jam'iyah* yang memiliki ruang lingkup lebih besar dari sekedar sebuah kelompok diskusi.

<sup>2</sup> Kiai Hasyim Asy'ari merupakan tokoh ulama pesantren yang sangat berpengaruh di Jawa Timur pada saat itu.



dan penentu di balik berdirinya organisasi NU. Peran penentu Kiai Cholil ini berawal dari sebuah tongkat yang diberikannya kepada Kiai Hasyim Asy'ari beserta sejumlah ayat Alqur'an yang mengisahkan tentang perjuangan Nabi Musa AS dan tongkatnya yang istimewa untuk melawan kedzaliman Fir'aun<sup>3</sup>. Dari sinilah kemudian kisah mengenai tongkat tersebut bergulir. Proses dari Kiai Cholil menyerahkan tongkat sampai dengan perkembangan terakhir pembentukan *jam'iyah* NU, berjalan cukup lama. Bahkan ketika Kiai Cholil meninggal pada 29 Ramadhan 1343 H, keinginan untuk membentuk *jam'iyah* belum juga terwujud. Satu tahun kemudian, yaitu pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M, barulah keinginan tersebut terwujud.

Martin Van Bruinessen (1997) menyebut NU sebagai organisasi ulama tradisional dengan jumlah pengikut terbanyak, serta memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik baik di tanah air maupun di lingkup internasional. Peran tersebut antara lain tampak dalam peristiwa yang dikenal dalam sejarah NU sebagai Delegasi Hijaz. Dimana saat itu para ulama NU mengirim satu delegasi yang terdiri atas KH Abdul Wahab Chasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim (orang Mesir yang mengajar di Surabaya) ke Mekkah pada tahun 1928 menemui Raja Ibnu Saud untuk meminta jaminan kebebasan agama bagi muslim yang tidak mengikuti ajaran Hambali<sup>4</sup> terutama umat muslim Indonesia yang mayoritas

<sup>3</sup> Kiai Cholil, guru dari Kiai Hasyim dan Kiai Wahab, menyerahkan tongkat beserta ayat Alqur'an kepada Kiai Hasyim melalui cucunya yang bernama Kiai As'ad Syamsul Arifin. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan dan kepekaan Kiai Cholil yang luar biasa terhadap keresahan yang dialami oleh Kiai Hasyim setelah bertemu dengan Kiai Wahab yang meminta saran dan nasihatnya untuk membentuk *jam'iyah* bagi para ulama *ahlussunnah waljama'ah*.

<sup>4</sup> Bangkitnya umat Islam di seluruh dunia di awal abad XX ketika itu, selain memiliki dampak positif, ternyata juga menimbulkan dampak negatif dengan munculnya *khilafiyah furu'iyah* - perbedaan pemahaman dalam menjalankan ibadah - yang diawali dengan jatuhnya kota Mekkah sebagai pusat Islam dunia ke tangan kaum Wahabiyah yang dikenal anti mazhab, sehingga dikhawatirkan akan mengancam faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan kehidupan bermazhab yang sudah mapan dan

menganut paham *ahlussunnah waljama'ah*<sup>5</sup>. Tindakan yang dilakukan oleh NU ini merupakan salah satu bentuk diplomasi yang juga dapat dikategorikan sebagai tindakan komunikasi politik internasional.

Peran penting lain yang dimainkan oleh NU dalam kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia terjadi ketika Indonesia berjuang melawan penjajah untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan di tahun 1945. Gerakan politik NU yang sebelumnya dikenal moderat dan kompromistis karena menganut tradisi politik sunni<sup>6</sup>, saat itu berubah menjadi sebuah gerakan perlawanan terhadap Belanda dan penjajah yang dinilai tidak lagi memiliki legitimasi sebagai penguasa atau pemerintah di Indonesia. Sikap NU yang suka berubah dan kadang sulit diterka ini, oleh Ecip (1989) disebut sebagai sifat "kenyal tetapi keras" yang menjadi salah satu ciri NU.

Di saat perang kemerdekaan, berbagai opini publik dimunculkan sebagai upaya memotivasi para pejuang kemerdekaan. Salah satunya adalah fatwa yang diberikan oleh Hadlratussyaiikh Hasyim Asy'ari, yang menyatakan bahwa perjuangan melawan penjajah merupakan *jihad* (perang suci), yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Fatwa ini kemudian dikenal sebagai "Resolusi Jihad"<sup>7</sup>. KH Hasyim Asy'ari yang juga *Rois 'Aam* (Ketua Umum) Syuriah NU<sup>8</sup> saat itu, menurut

---

dianut oleh mayoritas masyarakat muslim di dunia termasuk di Indonesia

<sup>5</sup> Merupakan paham keagamaan yang dalam melaksanakan ibadah mengikuti ajaran empat mazhab, yaitu: Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Pada kenyataannya, mayoritas pengikut paham *ahlussunnah waljama'ah* di Indonesia lebih memilih untuk mengikuti ajaran Imam Syafi'i.

<sup>6</sup> Tradisi politik sunni berpandangan bahwa sebuah pemerintahan yang memperbolehkan umat Islam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya lebih baik dari pada fitnah (*chaos*) yang diakibatkan oleh pemberontakan.

<sup>7</sup> Teks Resolusi NU tentang *jihad fi sabilillah* (perang suci) dibagi-bagikan segera setelah rapat pimpinan NU di Surabaya pada bulan Oktober 1945 dalam bentuk leaflet (Martin van Bruinesen, 1997).

<sup>8</sup> Syuriah merupakan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama yang berfungsi membina, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan Nahdlatul Ulama yang

Saifuddin Zuhri (van Bruinessen, 1997), mengeluarkan *fatwa* yang menyatakan bahwa mempertahankan tanah air adalah kewajiban bagi semua orang Islam yang dalam hukum Islam disebut sebagai *fardlu 'ain*<sup>9</sup>. Kepemimpinan KH Hasyim Asy'ari yang penuh kharisma telah berhasil membawa NU menjadi organisasi sosial keagamaan yang diperhitungkan dan memiliki peranan penting di tanah air hingga beliau wafat pada tahun 1947 di Jawa Timur.

Sepeninggal KH Hasyim Asy'ari tongkat kepemimpinan NU dipegang oleh KH Abdul Wahab Chasbullah yang dikenal enerjik, supel dan motor penggerak organisasi yang sukses. Pada masa kepemimpinan Kiai Wahab sejak tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, NU banyak berperan dalam percaturan politik di tanah air. NU di bawah kepemimpinannya telah menjelma menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan oleh semua kekuatan politik di tanah air. Tak terkecuali oleh Presiden Soekarno, yang merupakan figur sentral dalam perpolitikan nasional. Begitu kuat dan pentingnya peran NU bagi stabilitas politik Soekarno, sehingga saat itu muncul joke yang umum diperdengarkan: "*Soekarno tanpa NO;... Soekar...!*", "*Bung Karno tanpa NO; ...Bongkar...!*". (Catatan: "NO" adalah ejaan saat itu untuk Nahdlatul Oelama). Keberhasilan Kiai Wahab dalam membawa NU ke blantika perpolitikan nasional tidak terlepas dari kaidah dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Kiai Wahab terutama pandangan-pandangan politik yang dianutnya. Bagi Kiai Wahab (Hamdan Rasyid, dkk, 1999), politik adalah mengejar tujuan dan

---

dipimpin oleh Dewan Tanfidz. Dewan Syuriyah NU terdiri atas para ulama dan kiai yang dalam organisasi NU memiliki kedudukan penting sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip ajaran *ahlussunnah waljama'ah* yang menurut pengertian dan pemahamannya meyakini ulama sebagai pewaris nabi, sehingga memposisikan ulama pada kedudukan sentral, di mana seluruh warga NU wajib menghormati dan mengakui kepemimpinan dan otoritas mereka.

<sup>9</sup> Salah satu hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim secara individu dengan konsekuensi apabila dilaksanakan akan memperoleh pahala (*reward*) dan jika ditinggalkan akan berdosa atau mendapat *punishment*

menggunakan kekuatan, sehingga untuk dapat melindungi dan memajukan Islam dan umat Islam adalah dengan menjamin adanya pembagian kekuasaan politik. Prinsip ini yang membuat Kiai Wahab mantap dan yakin untuk membawa NU yang pada awal berdirinya merupakan organisasi sosial kemasyarakatan menjadi partai politik<sup>10</sup> sebagai upaya memperjuangkan kepentingan Islam.

Keterlibatan NU secara langsung di dunia politik sebagai sebuah partai politik terjadi setelah NU keluar dari Masyumi berdasarkan keputusan resmi Mukatamar NU pada tanggal 1 Agustus 1952. Keluarnya NU dari Masyumi merupakan salah satu peristiwa penting bagi sejarah perjuangan NU dan bagi karir Kiai Wahab, baik sebagai pemimpin maupun sebagai komunikator politik. Hal ini kemudian dibuktikan dengan keberhasilan NU sebagai partai politik ketiga terbesar dalam Pemilu 1955 (setelah PNI dan Masyumi). Hasil pemilu ini tidak hanya mencerminkan kemenangan NU sebagai sebuah partai politik tetapi juga kemenangan pribadi Kiai Wahab. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari ketajaman 'naluri' politik Kiai Wahab dan keluwesannya dalam melakukan komunikasi politik di internal NU untuk meyakinkan para kiai dan tokoh-tokoh NU agar mengubah NU menjadi partai independen (berdiri sendiri) dan berpengaruh. Kegigihan dan kelihaian Kiai Wahab sebagai komunikator politik dalam percaturan politik di tanah air turut mempengaruhi peran dan

---

<sup>10</sup> Perubahan ini diawali dengan keluarnya NU dari Masyumi pada awal tahun 1950-an yang turut memengaruhi dinamika politik Indonesia pada kurun waktu yang lama. Keluarnya NU dari Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam ketika itu dipicu oleh kekecewaan NU terhadap Masyumi yang menolak tuntutan NU untuk menominasikan anggota NU masuk ke dalam kabinet baru. Saat itu, NU berharap dapat memegang kembali jabatan Menteri Agama yang telah ditempati selama dua periode kabinet terakhir. Sebelumnya, telah terjadi beberapa konflik yang juga menimbulkan kemarahan dan ketersinggungan NU terhadap Masyumi, seperti diubahnya beberapa peraturan partai yang membatasi peran Majelis Syuro yang selama ini didominasi oleh ulama NU, termasuk KH Abdul Wahab Chasbullah.

eksistensi NU di Indonesia ketika itu, hingga beliau wafat pada tahun 1971.

Sepeninggal Kiai Wahab, posisi Ketua Umum (*Rois 'Aam*) Syuriah NU dipercayakan kepada KH Bisri Syansuri yang dikenal sebagai ulama ahli fiqih yang keras dalam memegang prinsip-prinsip agama. Ada pun posisi Ketua Umum *Tanfidziyah*<sup>11</sup> telah dipegang oleh H Idham Chalid sejak Mukhtar NU ke-20 pada tahun 1966 ketika Kiai Wahab masih hidup. Selama masa kepemimpinan H Idham Chalid, NU masih melakukan perjuangan melalui jalur politik yang menjadi salah satu sarana penting dalam memperkuat *patronase*<sup>12</sup> NU di dalam pemerintahan. Peran penting NU dalam peta politik di Indonesia mulai terjadi perubahan setelah kepemimpinan H Idham Chalid digantikan oleh Gus Dur<sup>13</sup>, yang saat itu dikenal sebagai pembaharu muda NU<sup>14</sup>. Adapun posisi Ketua Umum (*Rois 'Aam*) Syuriah NU dipercayakan kepada KH Achmad Siddiq menggantikan KH Ali Ma'sum Krapyak yang menjadi pejabat sementara (*ad-interim*) sepeninggal KH Bisri Syansuri pada tahun 1980.

<sup>11</sup> Tanfidziyah merupakan pelaksanaan tugas harian, penggerak, dan pengelola realisasi program *jam'iyah*. Secara umum, Tanfidziyah mengusahakan kemajuan *jam'iyah* (organisasi NU) melalui badan-badan keorganisasian mulai dari tingkat nasional hingga desa-desa.

<sup>12</sup> Berkat keikutsertaan NU dalam pemerintahan terutama di lingkungan Departemen Agama, NU dapat memberikan berbagai pelayanan dan fasilitas kepada para pendukungnya di berbagai wilayah.

<sup>13</sup> Gus Dur lahir di Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940 dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang berarti Abdurrahman "Sang Penakluk". Nama tersebut kemudian berganti nama belakang keluarga menjadi Abdurrahman Wahid (mengambil nama sang ayah, Wahid Hasyim). Namun belakangan lebih populer adalah sapaan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai yang berarti kakak atau mas.

<sup>14</sup> Menurut Martin van Bruinessen, selain Gus Dur, ada beberapa pembaharu muda NU lainnya yang akan meneruskan perjuangan NU, antara lain: M. Zamroni (mantan aktifis mahasiswa), Mahbub Djunaidi (wartawan politisi), Said Budairi dan Abdullah Syarwani (keduanya aktifis Ornop/NGO), Slamet Effendi Yusuf, dan Masdar Farid Mas'udi (pemimpin mahasiswa dan pemikir muda NU yang paling menjanjikan).



Terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfidziyah NU menandai masuknya NU pada fase ketiga (Laode Ida dan Thantowi, 1999)<sup>15</sup>. Fase ketiga ini merupakan fase yang membuat kalangan *Nahdliyyin* maupun pihak-pihak di luar NU mengalami berbagai situasi yang agak “berbeda” dari sebelumnya. Arah gerakan NU setelah kembali ke “*khittah* 1926”<sup>16</sup> di bawah kepemimpinan Gus Dur merupakan gerakan ‘transformatorik’: di satu sisi hendak mencairkan kebekuan kultur, visi, dan orientasi internal NU, dan di sisi lain berupaya membangun kesadaran rakyat (termasuk warga *nahdliyyin* sendiri) untuk secara relatif bebas dari intervensi negara.

Pada tingkat internal NU, terjadi benturan-benturan kepentingan antara tokoh-tokoh dari faksi-faksi<sup>17</sup> yang

<sup>15</sup> Fase pertama adalah fase sebelum kemerdekaan di bawah kepemimpinan KH Hasyim Asy’ari sebagai pendiri NU. Ciri utama pada fase ini adalah peran aktif NU yang lebih menekankan pengembangan ajaran *ahlussunnah waljama’ah* melalui pendidikan pesantren. Pada saat itu para kiai lebih berperan sebagai pengembang gerakan keagamaan dengan berpegang pada ajaran empat mazhab (Mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi’i). Selain itu, pada fase ini ditandai juga dengan peran aktif para kiai dan kaum *Nahdliyyin* dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan fase kedua adalah fase keterlibatan NU dalam aksi politik praktis. Hal ini tidak terlepas dari situasi politik pada awal kemerdekaan dan dampak dari diakomodasinya berbagai kekuatan politik yang tumbuh di dalam masyarakat di mana NU bergabung dengan Masyumi sebagai representasi dari unsur Islam yang ada ketika itu, sampai akhirnya memisahkan diri menjadi partai NU pada tahun 1952 (hasil Muktamar NU di Palembang)

<sup>16</sup> *Khittah* dapat diartikan sebagai ‘garis’ kebijakan organisasi. Kembali ke *Khittah* artinya untuk kembali kepada tujuan awal berdirinya organisasi NU dalam melakukan perjuangan di bidang pendidikan (*ma’arif*), kesejahteraan sosial (*mabarrat*), penyebaran agama (*da’wah*), dan perekonomian (*mu’amalah*). Situasi dan kondisi internal NU yang saat itu dinilai sudah keluar dari tujuan utama, serta situasi dan kondisi politik yang dinilai sudah tidak lagi kondusif bagi perjuangan NU, maka sejak Musyawarah Nasional (Munas) di Situbondo, para ulama telah menyepakati pokok-pokok pikiran untuk melakukan *khittah*. Pemikiran kembali ke *khittah* ini bertujuan untuk mengembalikan NU pada cita-cita awal berdirinya di tahun 1926 dengan menitik beratkan pada kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi terbengkalai ketika NU menjadi sebuah partai politik dan para pengurusnya turut berperan aktif dalam kegiatan politik praktis di tanah air.

<sup>17</sup> Saat itu muncul tiga faksi (Laode Ida dan Thantowi, 1999) yang dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing faksi, yaitu: faksi politik, faksi kiai (syuriyah), dan faksi cendekia. Faksi politik masih belum bisa memisahkan antara aktivitas mereka sebagai politisi dengan posisi mereka sebagai warga NU. Kesulitan ini disebabkan

ada tidak dapat dihindari, sedangkan di tingkat eksternal, hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru yang otoriter menjadi persoalan tersendiri bagi Gus Dur dan NU. Hegemoni dan dominasi negara yang dilakukan oleh Orde Baru mengakibatkan termarjinalisasinya peran masyarakat pada umumnya dan menurunnya tingkat kemandirian organisasi<sup>18</sup>. Untuk itu, Gus Dur mengembangkan strategi gerakan politik kultural<sup>19</sup> yang didasarkan pada suatu kesadaran bahwa, tidak akan pernah terjadi pelaksanaan sistem politik yang kondusif demokratis selama rakyat tidak memiliki kesadaran akan hak-hak politiknya secara baik dan benar. Artinya, kesadaran kritis rakyat merupakan modal utama dalam upaya menciptakan demokratisasi dalam pelaksanaan sistem politik. Selain itu, juga perlu dibangun kesadaran masyarakat akan kebhinekaan<sup>20</sup> yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dengan latar belakang kebhinekaan budaya, etnis, suku dan agama. Kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut dapat menjadi suatu kekuatan yang luar biasa jika dikembangkan dalam sistem negara yang demokratis.

Aktifitas Gus Dur dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia, dilakukan dengan menggunakan komunikasi verbal maupun non verbal, yaitu keseimbangan antara perkataan dan perbuatan, sebagaimana dikemukakan oleh

---

karena watak politik yang telah tertanam kuat dan cukup lama dalam diri mereka. Sementara itu, faksi syuriah tetap berusaha untuk mempertahankan tatanan dan nilai-nilai normatif NU yang menyebabkan pola pikir dan tindakan mereka terasa kaku. Sedangkan faksi cendekia relatif memiliki pola pikir dan tindakan yang berbeda dengan kedua faksi lainnya, yaitu cenderung bebas memberikan penafsiran terhadap gerak langkah perjuangan NU sehingga terasa lebih luwes dan lentur.

<sup>18</sup> Hal ini disebabkan karena hilangnya patronase yang sebelumnya menjadi salah satu sarana pendukung yang penting bagi kehidupan organisasi

<sup>19</sup> Berpolitik secara kultural merupakan proses politik yang dilakukan oleh Gus Dur dengan cara membangun kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya, hak-hak ekonominya, dan sebagainya.

<sup>20</sup> Gus Dur juga mengemukakan gagasan tentang *pluralism*, dalam arti non-asimilasi dan menuntut adanya keikhlasan untuk menerima perbedaan tanpa harus kehilangan identitas dan jati diri.

salah satu keponakannya yang kini menjabat sebagai salah satu Menteri di Kabinet Indonesia bersatu jilid II, Muhamin Iskandar; "Menariknya Gus Dur itu 'kan, bukan hanya sekedar tulisan atau gagasan, tetapi dia melakukan komunikasi dengan melakukan gerakan".

Selain itu, Gus Dur juga berupaya untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu, yang oleh Kenneth Burke (1969) disebut sebagai pengidentifikasian. Dalam hal ini, Gus Dur berupaya untuk mengidentikkan dirinya dengan masyarakat Indonesia pada saat itu. Gus Dur menyadari kondisi psikologis masyarakat Indonesia di era Orde Baru yang cenderung represif dan otoriter, telah membuat masyarakat menjadi sangat berhati-hati dalam menyampaikan gagasan dan pemikirannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, pada awal-awal kedatangannya di tanah air setelah belajar di luar negeri, Gus Dur lebih banyak menyampaikan gagasan dan pemikirannya tentang demokrasi melalui tulisan yang dimuat di beberapa media cetak.

Ide-ide dan gagasan Gus Dur tentang demokrasi, sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal. Prinsip-prinsip yang juga menjadi doktrin *ahlussunnah waljama'ah* ini, dirumuskan antara lain dengan sikap *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil) dalam berinteraksi dengan orang lain. Doktrin ini pada dasarnya merupakan ciri khas NU sebagai sebuah organisasi yang kemudian menjadi landasan pemikiran dan gerakan Gus Dur dalam menyikapi masalah sosial politik. Selain itu, sikap dan tindakan Gus Dur juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi gerakan NU hasil muktamar Situbondo sebagai konsekuensi kembali ke "*khittah 1926*"

yang oleh Laode Ida dan Jauhari (1999) disebut sebagai 'gerakan baru' yang berangkat dari paradigma "*nahdlatul wathon*" (kebangkitan gerakan kebangsaan), "*nahdlatul tujjar*" (kebangkitan gerakan ekonomi kerakyatan) dan "*nahdlatul fikkar*" (kebangkitan gerakan pemikiran).

Kebangkitan gerakan kebangsaan (*nahdlatul wathon*) dilakukan oleh Gus Dur dalam upaya menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam hidup berbangsa dan bernegara. Gerakan ini lebih menekankan persatuan dan kesatuan serta menolak kecenderungan sektarianisme. Hal ini pula yang tampaknya menjadi alasan Gus Dur untuk menolak bergabung di dalam ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).<sup>21</sup> Adapun kebangkitan gerakan ekonomi kerakyatan (*nahdlatul tujjar*) antara lain diimplementasikan dalam bentuk kerjasama antara NU dengan Bank Summa pada tahun 1990. Gerakan ini berawal dari keprihatinan Gus Dur terhadap adanya kesenjangan dan disparitas yang cukup tinggi dalam pemilikan kekayaan antara konglomerat dan pengusaha kecil.

Selanjutnya, NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan memprakarsai dialog antara konglomerat dengan pengusaha kecil yang dilanjutkan dengan kesepakatan untuk mendirikan 2000 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam kerjasama ini disepakati adanya pembagian saham (*sharing*) dengan komposisi saham enam puluh persen untuk NU yang diwakili oleh PT Dunia Duta Perintis dan empat puluh persen Bank Summa. Sedangkan kebangkitan gerakan pemikiran (*nahdlatul fikkar*) dilakukan oleh Gus Dur dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis dalam berbagai diskusi informal, baik di dalam NU atau kalangan internal NU

<sup>21</sup> Kendati demikian, menurut Laode Ida dan Thantowi (1999), ada anggapan bahwa penolakan Gus Dur untuk bergabung dengan ICMI berkaitan dengan faktor sejarah hubungan antara NU (yang sering diklaim sebagai penganut "Islam tradisional") dengan tokoh-tokoh Islam dari kalangan pembaharu yang mendominasi kepemimpinan di ICMI.

terutama generasi muda NU maupun diskusi dan kajian yang diadakan oleh masyarakat di luar NU terutama di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Seluruh ide dan gagasan tersebut<sup>22</sup> disampaikan oleh Gus Dur melalui dialog dan proses komunikasi yang terus menerus. Bagi Gus Dur, demokrasi merupakan suatu proses yang selalu berada dalam keadaan *menjadi*, sehingga diperlukan kesadaran dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya melalui dialog dan keterbukaan yang berkesinambungan. Komunikasi itu sendiri tidak terjadi dalam “ruang hampa” sosial, tetapi komunikasi itu sendiri hidup karena berinteraksi dengan sistem sosial. Bahkan sebaliknya, komunikasi juga berkontribusi terhadap kehidupan sosial. Tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan sosial, Gudykunst (1983: 259) menyatakan bahwa “Komunikasi mempertahankan semua hubungan manusia. Ini penting tetapi tidak cukup untuk mengatur kehidupan sosial. Pengaturan tersebut lebih tergantung pada adanya interaksi perilaku yang bermakna yang menghubungkan pesan melalui hubungan yang mereka bentuk” (*Communications sustain all human relationship. It is necessary but insufficient for organizing social life. That organization is further contingent upon the significance interactants attribute to the messages through which their relationship are constituted*)

Proses komunikasi melibatkan unsur lingkungan sebagai wahana yang “mencipta” proses komunikasi itu berlangsung. Porter dan Samovar (1990: 19), mengatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan-tindakan sosial yang rumit

<sup>22</sup> Ide-ide dan gagasan tentang demokrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pesan-pesan politik karena pesan-pesan tersebut memiliki muatan politik sebagaimana dikemukakan oleh Cangara (2009), pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

dan saling berinteraksi, serta terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang kompleks. Lingkungan sosial ini merefleksikan bagaimana orang hidup dan berinteraksi dengan orang lain serta berupaya untuk saling mengidentifikasi diri satu sama lain, yang disebut juga dengan konsubstansialitas (Burke, 1969) untuk mencapai suatu tujuan atau *purpose* (Burke, 1969) yang disepakati bersama.

Dalam proses tersebut, pesan yang disampaikan dapat merupakan pesan-verbal maupun non-verbal yang diwakili dalam simbol-simbol yang dimaknai bersama oleh para pelaku komunikasi. Simbol sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang mewakili hal yang lain yang di dalamnya termasuk objek, gambar, kata-kata tertulis, dan suara. (*symbol is something such as an object, picture, written word, sound, or particular mark that represents something else by association, resemble, or convention* - [www.Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org)). Pemaknaan yang dilakukan dalam proses ini tidak terlepas dari keyakinan, nilai-nilai dan kepribadian yang dimiliki oleh para pelaku komunikasi yang oleh Burke (1966) disebut sebagai substansi dari setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi.

Sementara itu, James P. Spradley (1979) mendefinisikan simbol sebagai objek atau peristiwa apa pun yang menunjuk pada sesuatu. Semua simbol melibatkan tiga unsur. *Pertama*, simbol itu sendiri yang meliputi apa yang dapat dirasakan atau dialami. *Kedua*, satu rujukan atau lebih. Suatu rujukan adalah benda yang menjadi rujukan simbol. Rujukan dapat berupa apa pun yang dapat dipikirkan dalam pengalaman manusia. *Ketiga*, hubungan antara simbol dengan rujukan. Hubungan ini merupakan hubungan yang berubah-ubah, yang di dalamnya rujukan disandikan dalam simbol itu. Jika penyandian itu terjadi, maka seseorang akan berhenti untuk memikirkan simbol itu sendiri dan memfokuskan perhatiannya pada apa

yang dirujuk oleh simbol itu. Ketiga hal ini merupakan dasar bagi semua makna simbolik.

Makna yang diterapkan pada suatu simbol sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat (*society*) di mana seorang individu berada, yang oleh Burke (1966) dalam *dramatistic pentad* disebut sebagai *scene* atau konteks berlangsungnya proses pemaknaan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah keluarga, teman dekat, kelompok, organisasi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Herbert Mead (1962) yang tertarik pada kajian interaksi sosial menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang dikeluarkan oleh orang lain, demikian pula perilaku orang lain tersebut dipengaruhi oleh simbol yang kita sampaikan. Melalui simbol-simbol tersebut, seseorang menyampaikan perasaan, pikiran, maksud dan tujuannya kepada orang lain.

Manusia, menurut Burke (1966), merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan simbol dalam berkomunikasi (*the symbol using animal*). Pilihan Burke terhadap istilah 'penggunaan simbol' daripada 'penggunaan bahasa' dapat memperluas definisinya, sehingga dapat mencakup berbagai fenomena yang lebih luas. *Pertama*, simbol memungkinkan seseorang untuk lebih menggeneralisasi pengalaman pribadi. Apa yang diperoleh seseorang bisa dibagi dengan orang lain yang kemudian diperluas melalui representasi simbolik. *Kedua*, penggunaan simbol memungkinkan pengalaman seseorang untuk ditiru dengan menggunakan metode yang serupa. *Ketiga*, dan mungkin ini yang paling ditekankan oleh Burke, bahwa simbol dapat digunakan oleh pemimpin rakyat yang pandai berpidato untuk memanipulasi orang.



Ide-ide dan pemikiran tentang demokrasi yang disampaikan oleh Gus Dur tersebut merupakan pembicaraan politik yang kemudian berkembang menjadi wacana politik (*political discourse*). Kendati demikian, bukan berarti bahwa semua pembicaraan politik pasti akan menjadi wacana politik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Menurut Gus Dur, politisi yang hebat adalah politisi yang mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dan menyampaikan gagasannya. Kalau waktunya tidak tepat, maka tidak akan ada yang menanggapi, sehingga tidak mungkin berkembang menjadi sebuah wacana politik (Wahid, 1998).

Ada dua belas *scene* atau peristiwa penting yang menjadi drama dari retorika politik Gus Dur yang dinilai sebagai saat atau momentum yang tepat untuk menunjukkan sikapnya terhadap persoalan yang berkaitan dengan demokrasi, masalah hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan internal organisasi NU di satu sisi, dan di sisi lain adalah peristiwa yang terkait dengan persoalan yang ada di luar NU. Namun demikian, bukan berarti bahwa di antara kedua hal tersebut tidak terdapat keterkaitan satu sama lain, karena ada beberapa peristiwa yang justru menjadi persoalan yang melibatkan pihak yang ada di lingkungan internal NU dan di luar lingkungan NU.

*Pertama*, Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang memutuskan untuk kembali ke *khittah* 1926 dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. *Kedua*, Munas Alim Ulama NU di Cilacap. *Ketiga*, Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta. *Keempat*, situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pasca pengumuman *polling* atau jajak pendapat yang dilakukan oleh majalah Monitor. *Kelima*, pembentukan Forum Demokrasi

(Fordem). *Keenam*, Rapat Akbar dan Istighosah NU di Istora Senayan. *Ketujuh*, Muktamar NU ke-29 di Cipasung. *Kedelapan*, penyerangan dan pengambilalihan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996. *Kesembilan*, pertemuan para tokoh masyarakat dengan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Mei 1998 di Istana Negara. *Kesepuluh*, Deklarasi pembentukan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada bulan Juli 1998, *Kesebelas*, Dialog Nasional di Ciganjur yang bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Istimewa DPR/MPR pada tanggal 10 November 1998, dan *keduabelas* berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional yang dilakukan menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999.

Mengikuti teori Burke (1966), dapat dikatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Gus Dur dalam setiap peristiwa yang dinilainya penting merupakan drama atau dramatisitik (Griffin, 2000; Littlejohn, 2005) dari kehidupan Gus Dur. Burke percaya bahwa hidup tidak hanya seperti drama, tetapi hidup adalah drama itu sendiri. Dengan demikian, seluruh rangkaian peristiwa yang dilakoni oleh Gus Dur juga merupakan bagian dari sejarah hidupnya (*life story*).

Selama ini telah banyak dilakukan penelitian dan kajian tentang NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta Gus Dur sebagai tokoh NU, baik dari perspektif sejarah, sosial, maupun politik. Hal ini tidak mengherankan mengingat NU merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial politik di tanah air. Salah satunya adalah kajian yang telah dilakukan oleh Martin Van Bruinessen pada awal tahun 1990-an yang dituangkan dalam bukunya "*Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict, and The Search for A New Discourse*" dan diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia oleh Farid Wajidi dengan judul “NU – Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru” pada tahun 1994.

Dalam bukunya tersebut, Martin Van Bruinessen mendeskripsikan tentang tradisi yang ada di NU, relasi-relasi kuasa yang melatarbelakangi perubahan-perubahan di tubuh NU, serta peran aktif NU dalam percaturan politik di tanah air terutama pada saat NU merubah diri menjadi partai politik hingga pemahaman terhadap keputusan-keputusan organisasi NU untuk kembali kepada *khittah*-nya sebagai upaya pencarian wacana baru. Bruinessen menjabarkan tentang tradisi pesantren yang merupakan cikal bakal berdirinya NU dan pengaruh tradisi pesantren terhadap tradisi yang ada di dalam NU sebagai sebuah organisasi. Selain itu, Bruinessen juga menuliskan tentang relasi-relasi kuasa yang ada di dalam NU maupun hubungan kekuasaan antara NU dengan pemerintah serta pihak atau organisasi di luar NU seperti organisasi politik maupun organisasi sosial lainnya.

Pada tahun 2002, Kang Young Soon memaparkan hasil penelitian untuk disertasinya pada Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dengan judul “Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitan Nahdlatul Ulama, 1984-1999”. Penelitian yang dilakukan oleh Kang Young Soon ini lebih menitikberatkan pada peran politik NU sejak Muktamar 27 tahun 1984 sampai terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI di tahun 1999. Disertasi ini mengkaji tentang tradisi pesantren yang begitu kuat mempengaruhi perilaku orang-orang NU (warga *Nahdliyin*) yang ditandai dengan keterikatan dan kepatuhan yang luar biasa dari para santri kepada kiai yang dinilai memiliki wibawa dan pengaruh yang sangat dominan.

Oleh karena itu, dimensi individu dalam NU lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi lembaga atau sistem.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah berpengaruh terhadap organisasi (*jam'iyah*) NU dan memberi peluang bagi NU untuk kembali terlibat dalam percaturan politik nasional secara organisatoris tanpa mengesampingkan "*khittah* 1926". Hal ini ditandai dengan didirikannya empat partai politik oleh orang-orang NU, yaitu PKNU, PNU, SUNI, dan PKB. Beragamnya partai politik dari orang-orang NU ketika itu merefleksikan adanya perbedaan pandangan dan pendapat yang menunjukkan adanya pluralisme sebagai suatu realita di dalam NU. Perbedaan pandangan yang menjadi pemicu timbulnya konflik dalam perilaku warga NU ternyata cenderung berperan dalam kepolitikan NU, baik secara internal maupun eksternal (politik nasional)

Kajian lain tentang NU dalam perspektif ilmu politik juga dilakukan oleh Endang Turmudi dalam disertasinya untuk meraih gelar doktor di *The Australian National University* pada tahun 2003. Dalam disertasinya yang berjudul "*Struggling for the Umma - Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*", Turmudi yang di tahun 2004 terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, menuliskan tentang daerah yang penting (*heartland*) bagi NU, peran ulama atau kiai di NU, hubungan dekat atau kekerabatan di antara para kiai, peran-peran mereka dalam politik lokal dan nasional, serta peran mereka sebagai pimpinan bagi komunitas Islam. Melalui kajiannya tersebut, Turmudi juga mengkritisi peran kiai (khususnya di Jawa) dalam organisasi pendidikan Islam di sekolah berasrama (*boarding school*) yang dikenal dengan nama 'pesantren' dan bimbingan sufi tertentu yang disebut

dengan 'tarekat'. Menurut Turmudi, di seluruh Jawa, fungsi utama dari sekolah berasrama (*boarding school*) adalah sebagai pusat belajar atau pengetahuan dan juga sebagai pusat praktik agama yang lebih luas sesuai dengan aliran sufi tertentu yang dianut atau dipatuhi dengan setia.

Adapun kajian tentang NU dari perspektif sejarah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain H. Musthofa Sonhadji dalam tesisnya yang berjudul "Nahdlatul Ulama - Organisasi Sosial Keagamaan Tahun 1926-1952" (Suatu Tinjauan Kultural Historis) pada tahun 1987. Dalam tesisnya tersebut, Sonhadji menulis tentang latar belakang berdirinya NU yang didorong oleh situasi sosial keagamaan dan situasi politik di tanah air pada pertengahan abad XV. Selain itu, Sonhadji juga menguraikan tentang faham dan tata nilai yang ada dalam organisasi NU, perkembangan NU dari muktamar ke muktamar serta perjuangan NU dalam upaya turut merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Penelitian juga dilakukan oleh Mujib Roni dalam tesisnya yang berjudul "Representasi Sosial tentang Nahdlatul Ulama : Studi Identitas pada Kelompok Sosial Keagamaan" pada tahun 2008. Penelitian Roni mengkaji tentang identitas suatu organisasi atau kelompok sosial yang tercipta dari proses komunikasi sosial. Terbentuknya representasi sosial dimungkinkan oleh adanya pertukaran informasi dari adanya hubungan antar individu dalam kelompok sosial. Oleh karena itu, maka bahasa dan makna merupakan faktor terpenting dalam proses pembentukan representasi sosial.

Gagasan utama dalam penelitian Roni menyatakan bahwa representasi sosial tentang identitas komunitas NU lebih berorientasi pada sisi ritual keagamaan. Perilaku sosial dan karakter sosial, sistem kelembagaan serta penokohan bukan

merupakan orientasi utama. Dengan demikian, pergerakan nalar masyarakat NU saat ini tidak jauh berbeda dengan pertama kali NU dilahirkan, yakni melindungi kepentingan Islam tradisional. Implikasi penelitian ini menjawab bahwa identitas NU tidak sebatas sebuah komunitas konservatif, pengkultusan individu, suka berpolitik, hanya berkuat pada dunia pesantren saja dan lain sebagainya, tetapi komunitas NU pergerakan nalarnya lebih pada masalah ritual keagamaan.

Adapun kajian NU dari perspektif ilmu komunikasi politik khususnya media massa sebagai salah satu unsur dari proses komunikasi dilakukan oleh Fathurin Zen pada tahun 2001 dalam tesisnya yang berjudul "Komunikasi dan Konflik Politik Antara Kelompok Islam Tradisional dan Modern (*Framing Analysis Terhadap Berita-berita Mengenai Nahdlatul Ulama Dalam Media Cetak*)". Dalam tesisnya, Zen mengemukakan bahwa hadirnya PKB sebagai partai politik baru pada saat itu, mampu mengubah tatanan politik sehingga memunculkan tiga kelompok kekuatan massa – kaum nasionalis, tradisional, dan modernis – yang kemudian melawan kekuatan lama yaitu Partai Golkar dalam perebutan kekuasaan. Peristiwa ini kemudian menjadi komoditas politik para pekerja media melalui liputan dan berita-berita mengenai peristiwa tersebut berdasarkan perspektif dan kepentingan masing-masing.

Menurut Zen, 'hegemoni ideologi' media, cukup dominan dalam menciptakan realitas simbolik mengakibatkan munculnya 'hegemoni tandingan' (*counter hegemony*) yang memberikan ruang publik bagi kelompok atau media yang dirugikan dan dipinggirkan untuk memberikan 'konsep tandingan' sebagai alternatif ideologi. Dengan demikian, realitas sosial yang dikonstruksi tidak bersifat tunggal melainkan muncul sebagai "realitas yang beragam" (*multiple*

reality). Keragaman realitas tidak terlepas dari perspektif yang digunakan dalam melihat realitas tersebut, begitu pula dalam melihat realitas yang ada di NU sebagai organisasi Islam tradisional terbesar di dunia pada saat ini.

Kajian lain yang berkaitan dengan komunikasi politik juga dilakukan Basuki Agus Suparno pada tahun 2010 dalam disertasi yang berjudul "Kontestasi Makna dan Dramatisme: Studi Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia". Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *dramatistic pentad* dari Kenneth Burke ini menemukan bahwa reformasi memiliki makna transformatif yang mencakup tema-tema yang luas dengan menampilkan beragam pernyataan. Konteks-konteks kejadian seperti krisis ekonomi, aksi dan demonstrasi mahasiswa, kerusuhan massa, pencalonan presiden untuk masa bakti 1998-2003, hingga persoalan kedudukan ABRI, mencerminkan adanya keterkaitan yang menguatkan tuntutan terhadap pemerintahan Orde Baru.

Sedangkan kajian tentang Gus Dur dalam berbagai perspektif telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Syamsuddin Haris dalam disertasi yang berjudul "Konflik Presiden Gus Dur dengan DPR dalam Era Transisi Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1999-2001)". Penelitian ini menelaah sebab-sebab yang mendorong munculnya konflik antara Presiden Abdurahman Wahid dengan DPR. Dalam hal ini, penelitian lebih difokuskan pada kajian tentang perilaku Gus Dur sebagai aktor politik. Selain itu, pada tahun 2003, Yanuar Prihatin juga mengkaji tentang Gus Dur dalam Tesisnya yang berjudul "Studi tentang Pemikiran dan Perilaku Politik Gus Dur (1984-2001)". Penelitian ini mengkaji tentang perilaku politik Gus Dur sebagai pemimpin organisasi, baik di NU, PKB maupun sebagai Presiden RI ke-empat. Hasil penelitian

Tabel: 1

**DRAMATISTIC PENTAD:**

## RETORIKA POLITIK GUS DUR DALAM PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA

ACT	SCENE	AGENT SUBSTANCE	AGENCY STRATEGY/ METHODE	PURPOSE
Menyampaikan ide dan gagasannya kepada kaum <i>Nahdliyyin</i> dan peserta Muktamar tentang pentingnya NU kembali ke cita-cita awal berdirinya di tahun 1926 Melakukan komunikasi persuasi dengan ulama-ulama NU untuk menerima dan mendukung gagasan kembali ke <i>khittah</i> 1926 Menyampaikan pentingnya penegakan demokrasi dan menghargai keberagaman bangsa melalui Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam	Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada bulan Desember tahun 1984	GUS DUR Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode pertama Meyakini nilai-nilai Pancasila yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Agama	Kebijakan untuk kembali ke <i>khittah</i> 1926 Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal	Membuka peluang bagi warga NU untuk bisa masuk ke dalam partai-partai yang ada sebagai wujud dari kebebasan berpolitik Pendekatan dengan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru agar warga NU tidak lagi mengalami hambatan dalam beraktivitas akibat hubungan yang tidak harmonis dengan penguasaan pada masa kepemimpinan NU sebelumnya.



<p>Menyampaikan pemikirannya kepada peserta Munas dan Muktamar bahwa Islam harus dijabarkan menurut pemikiran atau kebudayaan daerah di mana dia hidup</p>	<p>Munas Alim Ulama di Cilacap pada tanggal 14 November 1987</p>	<p>GUS DUR Meyakini nilai-nilai keberagaman dan pluralitas masyarakat</p>	<p>Pribumisasi Islam</p>	<p>Memberikan Makna baru pada ajaran Islam dan membuka diri terhadap modernitas yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam tradisional</p>
<p>Menyampaikan pemikirannya kepada peserta Munas dan Muktamar bahwa Islam harus dijabarkan menurut pemikiran atau kebudayaan daerah di mana dia hidup</p>	<p>Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989</p>	<p>GUS DUR Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode Kedua</p>	<p>Pribumisasi Islam</p>	<p>Memupuk akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejarahan bangsa dalam mengembangkan kehidupan beragama Islam di Indonesia</p>
<p>Menyampaikan penolaknya terhadap tindakan semena-mena dari pemerintah dan umat muslim terhadap majalah Monitor dan Arswendo yang disampaikan melalui media massa</p>	<p>Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pasca pengumuman hasil <i>Polling</i> majalah <i>Monitor</i> Tahun 1990</p>	<p>GUS DUR Memiliki sikap egaliter dan Memegang teguh komitmen kemanusiaan dan anti kekerasan serta nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi.</p>	<p>Penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mencabut SIUPP majalah <i>Monitor</i>. Penolakan terhadap sikap anarkis dan semena-mena dari umat muslim terhadap Arswendo</p>	<p>Menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, yaitu: keadilan kesamaan, keterbukaan, dan pluralisme</p>

Menyampaikan penolakannya terhadap pembentukan ICMI pada tahun 1990 dan menolak tawaran untuk menjadi anggota ICMI	Pembentukan Forum Demokrasi pada tahun 1991	GUS DUR Terpilih sebagai Ketua Badan Pekerja Forum Demokrasi Memegang teguh komitmen kemanusiaan dan demokrasi	Mendirikan Forum Demokrasi pada tahun 1991	Mengurangi besarnya legitimasi Islam terhadap kekuasaan Soeharto Menyediakan sarana atau wadah alternatif bagi proses pembentukan dan tumbuhnya kesadaran demokrasi
Menyatakan ikrar kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945	Rapat Akbar dan <i>Istighosah</i> NU di Istora Senayan pada tahun 1992	GUS DUR Meyakini pembebasan, keadilan, kesamaan, dan keterbukaan sebagai nilai-nilai demokrasi	Penggalangan massa NU di acara Rapat Akbar dan <i>Istighosah</i>	Penolakan terhadap monopoli pemaknaan Pancasila oleh Pemerintahan Soeharto Penolakan terhadap pemberian dukungan terbuka kepada Soeharto sebagai calon presiden periode berikutnya
Menyampaikan pemikirannya di hadapan kaum <i>Nahdliyyin</i> bahwa NU merupakan organisasi Islam tradisional yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan menolak intervensi dari pihak mana pun	Muktamar NU ke-29 di Cipasung bulan Desember 1994	GUS DUR Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode Ketiga Memegang teguh komitmen kemanusiaan dan demokrasi	Dukungan kuat dari para ulama senior tradisional yang menolak intervensi pemerintah	Perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam kebebasan berorganisasi dan berpendapat Membuktikan kekuatan dukungan warga NU terhadap dirinya

Menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap penyerangan kantor DPP PDI	Penyerangan dan Pengambilalihan Kantor DPP PDI di Jl Dionegoro Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996	GUS DUR Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi	Memberikan dukungan moral kepada Megawati dan warga PDI Mendirikan POSKO bantuan dan pengaduan bagi masyarakat korban tragedi 27 Juli 1996	Membangun kekuatan untuk melawan hegemoni kekuasaan Orde Baru
Menyatakan himbauan kepada mahasiswa agar kembali ke kampus dan belajar seperti sediakala karena tuntutan reformasi telah direspon oleh pemerintah melalui dialog dengan para tokoh masyarakat	Pertemuan para tokoh masyarakat dengan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Mei 1998 di Istana Negara	GUS DUR Ketua Umum PBNU dengan basis massa terbesar Memegang teguh komitmen kemanusiaan dan demokrasi	Dialog dan kompromi politik antara masyarakat sipil yang diwakili oleh para tokoh masyarakat dan pemerintah sebagai penguasa	Pelaksanaan agenda reformasi di bidang politik dan hukum dilaksanakan secara konstitusional Menghindari pertumpahan darah dan korban yang lebih besar di kalangan masyarakat sipil Menjaga keutuhan bangsa dari ancaman perpecahan

<p>Menyatakan bahwa PKB adalah partai terbuka dan non-sektarian yang bertujuan menyukseskan program dan rencana reformasi</p>	<p>Deklarasi pembentukan PKB di Jakarta pada bulan Juli 1998</p>	<p>GUS DUR Menghargai nilai-nilai demokrasi</p>	<p>Pembentukan PKB sebagai partai politik terbuka</p>	<p>Menjaga keutuhan dan soliditas warga NU dalam menyalurkan aspirasi politik Membangun blok yang lebih besar untuk melawan Golkar sebagai partai pendukung Orde Baru yang dinilai otoriter dan tidak demokratis</p>
<p>Mengemukakan pentingnya pertemuan antara para pemimpin <i>de facto</i> yang ada di Ciganjur dengan pemimpin <i>de jure</i> yang ada di parlemen (ruang Sidang Senayan)</p>	<p>Dialog nasional yang dihadiri oleh Megawati, Hamengku Buwono X, Amien Rais, dan Gus Dur di Ciganjur bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Istimewa DPR/MPR RI tanggal 10 November 1998</p>	<p>GUS DUR Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi</p>	<p>Deklarasi Ciganjur pada tanggal 10 November 1998</p>	<p>Menampung suara yang muncul di luar gedung parlemen Menjadi figur dan kekuatan alternatif dari kekuatan negara yang sudah semakin lemah pada saat itu</p>

<p>Menyampaikan gagasannya tentang perlunya dilakukan rujuk nasional yang melibatkan tokoh-tokoh nasional, yaitu Soeharto, Habibie, Wiranto, dan Gus Dur sendiri.</p>	<p>Menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR 1999</p>	<p>GUS DUR Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi</p>	<p>Pertemuan dengan Benny Moerdani, Wiranto, Habibie, dan Soeharto selama bulan Desember 1998</p>	<p>Menyeimbangkan situasi politik demi keutuhan bangsa Mencegah tindakan kontra produktif dari massa pro-reformasi Membangun citra sebagai pemimpin nasional yang bisa melakukan komunikasi dengan semua golongan Dukungan masyarakat pada Pemilu 1999</p>
---	--	--	---	--

## **Kesimpulan: Mendobrak Kekuasaan Melalui Gagasan dan Retorika**

Sebagaimana namanya; *Ad-Dachil* (sang pendobrak), Gus Dur telah berhasil mendobrak tatanan kekuasaan otoriter orde baru, dan kemudian mengembangkan gagasan-gagasan baru bagi perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga akhir hayatnya, Gus Dur telah mendedikasikan dirinya bagi kebaikan negeri yang sangat dicintainya. Melalui tulisan-tulisan yang ia buat sejak tahun 1970-an, Gus Dur berhasil menunjukkan cara pandang baru bagi bangsa ini, untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Secara singkat, berdasarkan hasil analisis data dan permasalahan penelitian, maka ada dua hal yang bisa disimpulkan dalam bagian penutup ini. *Pertama*, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur dalam menyampaikan ide tentang demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Pada era tahun 1970-an, komunikasi politik yang dilakukan oleh Gus Dur lebih banyak dilakukan dengan komunikasi verbal yang bersifat tertulis, yaitu melalui tulisan-tulisan yang dimuat di media cetak dengan menggunakan simbol-simbol yang disampaikan melalui cerita atau kisah yang terdapat di pesantren dan nilai-nilai yang ada di masyarakat pesantren.

Pada tahun 1980-an, komunikasi politik yang dilakukan oleh Gus Dur melalui media ternyata semakin *intens*, dengan menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang lebih jelas dan terbuka. Selain itu, di era tahun 1980-an, Gus Dur juga mulai banyak melakukan tindakan-tindakan politik yang merupakan implementasi dari ide-idenya, terutama yang berkaitan dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat sipil (*civil society*) akan hak-hak politiknya. Dengan demikian, gagasan Gus Dur tentang demokrasi dan pluralisme menjadi berbeda dengan komunikator politik lainnya yang juga menyuarakan hal yang sama pada saat itu, karena apa yang ditulis oleh Gus Dur, selalu diiringi dengan tindakan konkrit, sesuai dengan tulisannya.

Sedangkan di era tahun 1990-an, meskipun penyampaian ide melalui tulisan di media sudah tidak terlalu intensif seperti tahun 1980-an, namun pada tahun ini, Gus Dur justru lebih banyak melakukan komunikasi politik melalui tindakan-tindakan politik dengan lebih terbuka dan berani. Bahkan, Gus Dur berani berhadapan langsung (*vis a vis*) dengan pemerintah sebagai penguasa Orde Baru yang memiliki kekuatan besar pada saat itu, terutama dalam memperjuangkan demokrasi yang diyakininya.

Nilai-nilai demokrasi yang diyakini oleh Gus Dur tidak terlepas dari perspektif atau pandangan politik *Sunni* yang diyakininya, yang oleh Burke (1969) disebut sebagai substansi dari Gus Dur. Pandangan politik *Sunni* yang cenderung menjaga harmonisasi dan menghindari semaksimal mungkin konfrontasi dengan penguasa demi kemaslahatan umat dan menjaga keutuhan bangsa inilah yang kemudian turut mempengaruhi proses identifikasi Gus Dur dengan khalayaknya, baik di lingkungan internal maupun di luar organisasi NU.

Teori Kenneth Burke tentang *dramatisme* yang menjadi teori utama dalam penelitian ini melihat identifikasi sebagai inti dari komunikasi persuasi. Seluruh komunikasi politik yang berlangsung selama perodesasi yang telah dikemukakan sebelumnya tersebut menunjukkan proses pengidentifikasian atau konsubstansialitas (Burke, 1969) yang dilakukan oleh Gus Dur sebagai komunikator politik dengan khlayaknya, baik yang berada di internal NU maupun khalayak yang ada di luar NU. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, ditemukan bahwa ada beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya pengidentifikasian antara Gus Dur dan khlayaknya, tetapi, pada saat yang sama, peristiwa tersebut juga menimbulkan perbedaan (*division*) antara Gus Dur dengan mereka.

Hal ini bisa terjadi, karena menurut Burke (1969), substansi yang merupakan ciri pokok atau bagian terpenting dari suatu objek, bersifat relatif. Artinya, dalam menangkap esensi makna suatu objek, ada berbagai kemungkinan yang terjadi dalam diri seseorang ketika mengartikulasikan pemikirannya terhadap makna dari objek tersebut. Identifikasi terjadi ketika terdapat ekuivalensi relatif terhadap substansi yang meliputi semua hal terhadap suatu objek dalam proses komunikasi di antara para pelaku komunikasi (Burke, 1969). Sebaliknya, dapat mengakibatkan terjadinya pemisahan atau perbedaan (*division*), ketika substansi dari suatu objek dipahami atau dimaknai secara berbeda diantara pelaku komunikasi.

Adapun kesimpulan yang *kedua* berkaitan dengan analisis terhadap *dramatistic pentad* dari retorika politik Gus Dur selama era Orde Baru. Proses identifikasi atau konsubstansialitas yang dilakukan oleh Gus Dur dan khlayaknya menjadi pembuka jalan bagi berlangsungnya komunikasi politik dalam menyampaikan ide-ide tentang demokrasi di Indonesia,



sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kesimpulan pertama.

Berdasarkan hasil analisis terhadap *dramatistic pentad* dari retorika politik yang dilakukan oleh Gus Dur, menunjukkan bahwa selama era Orde Baru terdapat dua belas peristiwa penting yang menjadi panggung drama (*scene*) Gus Dur sebagai seorang aktor (*agent*) dalam menyampaikan ide-ide dan gagasannya (*act*) dengan menggunakan berbagai cara atau strategi (*agency*) dengan tujuan (*purpose*) untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun Gus Dur melakukan strategi (*agency*) yang berbeda-beda dalam setiap *scene* yang dimainkannya, namun sesungguhnya dapat ditarik satu benang merah yang mengarah pada tujuan (*purpose*) yang sama dari semua retorika politik yang dilakukan oleh Gus Dur tersebut, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis.

Artinya, sikap atau tindakan Gus Dur yang oleh banyak orang dinilai tidak konsisten atau *plin plan* dalam menegakkan demokrasi di tanah air, sesungguhnya justru merupakan perwujudan dari konsistensinya terhadap nilai-nilai demokrasi yang diyakininya dalam melakukan retorika politik, baik di internal maupun di luar organisasi NU. Untuk itu, Gus Dur dianalogikan oleh Muhammad Sobary (Zastrouw, 1999) sebagai penumpang kapal yang dinamis dan selalu berupaya untuk menyelamatkan kapal dari bahaya tenggelam. Ketika kapal oleng ke kanan, maka dengan gesit Gus Dur lari ke kiri. Sebaliknya, ketika kapal oleng ke kiri dan semua penumpang mengarah ke kiri, maka Gus Dur dengan lincah meninggalkan orang dan lari ke sisi kanan kapal. Hal ini dilakukan oleh Gus Dur untuk menjaga keseimbangan kapal agar tidak karam dan tenggelam. Dengan demikian, dibalik sikap Gus Dur yang tidak konsisten itu, justru terdapat

konsistensi terhadap keyakinannya akan nilai-nilai demokrasi, yaitu: keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan pluralistik atau keanekaragaman.

Menurut Burke (1969), identifikasi juga dapat menjadi sarana untuk melakukan persuasi dan komunikasi yang efektif. Sesungguhnya, tujuan utama seorang komunikator, termasuk komunikator politik, adalah mengubah pandangan dan pendapat khalayak, dan hal ini akan dapat diperoleh dengan melakukan identifikasi dan konsistensi dalam proses komunikasi persuasi. Komunikasi persuasi yang dilakukan oleh seorang komunikator politik, bertujuan untuk mengubah pandangan dan pendapat khalayaknya, baik di tingkat mikro, yaitu individu dan internal organisasi, maupun di tingkat makro, yaitu masyarakat luas secara umum.

Gus Dur, sebagai seorang komunikator politik, berupaya melakukan identifikasi dengan khalayaknya, baik di internal maupun di eksternal NU, melalui pesan-pesan politiknya, yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal untuk mencapai suatu perubahan, yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat sipil (*civil society*) akan hak-hak politiknya. Dengan adanya perubahan di tingkat mikro, yaitu masyarakat sipil (*civil society*) ini, diyakini Gus Dur akan turut mempengaruhi perubahan di tingkat makro, yaitu tatananan politik Indonesia secara keseluruhan, sehingga akan terjadi keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*).

Ide-ide dan pemikiran kritis Gus Dur tentang demokrasi dan pluralisme kadangkala disampaikan dengan cara-cara yang khas dan sulit diterima oleh masyarakat pada saat pesan itu disampaikan, sehingga tidak mengherankan kalau pada saat itu banyak terjadi penolakan terhadap gagasan tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ternyata

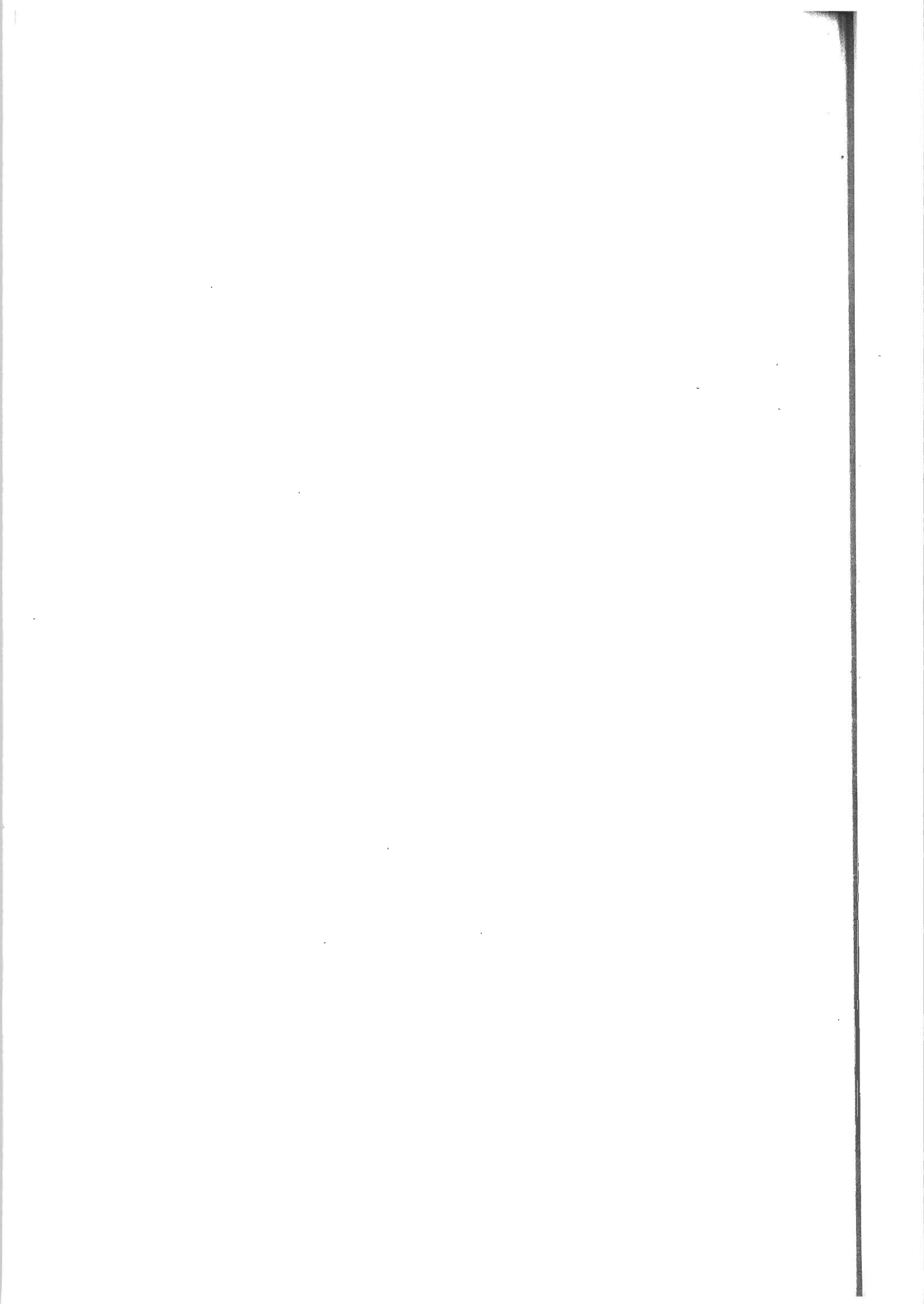
masyarakat menemukan pembuktian akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur beberapa waktu sebelumnya. Hal ini, menurut Aritoteles (Tancred, 1991), merupakan visi retorik dari seorang komunikator. Visi retorik merupakan gagasan ideal ke depan, atau ide-ide yang ideal dari seorang komunikator yang muncul dalam retorika atau komunikasi politik yang dilakukannya untuk mempengaruhi dan membujuk khalayaknya dalam upaya melakukan perubahan pendapat dan pandangan mereka ke depan.

Menurut *dramatistic pentad* yang dikemukakan oleh Kenneth Burke (1969), identifikasi menjadi pembuka jalan bagi proses komunikasi persuasi selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan dari retorika politik yang dilakukan oleh seorang *agent*, yaitu Gus Dur dan khalayaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang *agent* yang sama, yaitu Gus Dur sebagai seorang komunikator politik dapat melakukan tindakan (*act*) atau retorika politik yang berbeda-beda di setiap panggung drama (*scene*) yang berbeda-beda dan dengan menggunakan strategi (*agency*) yang berbeda-beda pula, namun dengan tujuan (*purpose*) yang sama, yaitu tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang demokratis.

Tindakan simbolik (*symbolic action*) yang dilakukan oleh Gus Dur dalam menyampaikan ide-idenya tentang demokrasi dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia, tidak selalu bisa diterima secara langsung oleh khalayaknya, baik yang ada di dalam organisasi NU, maupun di luar NU. Bagi khalayak yang dapat melakukan identifikasi dengan Gus Dur, maka perubahan pendapat dan pandangan akan dengan mudah dilakukan. Tetapi, bagi mereka yang justru mengalami perbedaan (*division*) dengan Gus Dur, maka akan sulit menerima perubahan yang ditawarkan oleh Gus Dur dalam setiap komunikasi politiknya.

Perubahan yang terjadi dalam suatu komunikasi politik, baik yang mengarah pada identifikasi maupun divisi, tidak terlepas dari substansi yang dimiliki oleh para pelaku komunikasi. Seiring dengan proses demokrasi di Indonesia yang mengarah pada pendewasaan akan kesadaran politik masyarakat, tidak terlepas dari retorika politik yang disampaikan oleh Gus Dur dalam menyampaikan Ide-ide dan pemikiran Gus Dur tentang demokrasi di Indonesia. Melalui retorika politiknya yang khas, baik yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, melalui tulisan maupun tindakan, Gus Dur turut menciptakan terbentuknya komunikasi yang lebih demokratis dan egaliter, baik di dalam organisasi NU, maupun di luar NU, yaitu masyarakat Indonesia secara umum.

Selain itu, karakteristik bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik secara etnis, budaya, agama, maupun suku, menurut Gus Dur, dapat senantiasa dijaga keharmonisannya tanpa harus kehilangan jati diri masing-masing, melalui dialog terbuka dan intensif dengan dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya kebersamaan bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Keyakinan tersebut telah membawa Gus Dur berjumpa dengan berbagai kalangan, dan menembus semua jenis sekat-sekat primordial yang ada di tanah air. Tujuannya adalah mewujudkan satu bangsa yang saling peduli satu sama lain, dan sejauh mungkin menghindari konflik-konflik kekerasan yang tidak perlu. Sangat pantas jika di ujung upacara pemakaman beliau pada akhir tahun 2009, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tegas menyebut Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme Indonesia.



## Daftar Pustaka

### **BUKU**

- Arif, Syaiful, 2009, *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif – Sebuah Biografi Intelektual*, Depok – Jabar, Penerbit Koekoesan.
- Arifin, As'ad Syamsul KHR, 1989, *NU dan Masa Depan*, dalam Ecip, S. Sinansari, 1989, *NU dalam Tantangan*, Jakarta, Al Kautsar.
- Aristoteles, 2007, *Politik (La Politica)*, Jakarta, Visimedia
- Baskoro, Wahyu (2005), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia – Dengan Ejaan yang Disempurnakan*, Setia Kawan, Jakarta.
- Bahar, Ahmad, 1999, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid – Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta, Bina Utama Jakarta.
- Baxter, Leslie A & Earl Babbie, 2004, *The Basics of Communication Research*, USA, Wadsworth
- Barton, Greg, *Abdurrahman Wahid dan Toleransi Keberagamaan*, dalam Suaedy, Ahmad dan Abdalla, Ulil Abshar (editor), 2000, *Gila Gus Dur – Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta, LKiS.
- Beetham, David & Boyle, Kevin, 2000, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, Jakarta, Penerbit Kanisius
- Bisri, A. Mustofa, 2008, *Gus Dur Garis Miring PKB*, Surabaya, Mata Air Publishing
- Bruinessen, Martin van, 1994, *NU – Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS.

- Budiardjo, Miriam, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Burger, Peter L & Thomas Luckmann, 1979, *The Social Construction of Reality A Treatise in The Sociology of Knowledge*, New York, Penguin Books
- Burke, Kenneth, 1969, *A Rethoric of Motieeves*, California, University of California Press
- , 1969, *A Grammar of Motives*, California, University of California Press
- , 1966, *Language a Symbol Action, Essay on Life, Literature, and Method*, California, University of California Press
- Carey, James W., 1992, *Communication As Culture, Assays on Media and Society*, New York, Routledge
- Cartee, Karen S. Johson, and, Copeland, Gary A., 2004, *Strategic Political Communication, Rethinking Social Influence, Persuasion, and Propaganda*, USA, Rowman & Littlefield Publisher, INC.
- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik – Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Chilton, Paul, 2004, *Analysing Political Discourse – Theory and Practice*, USA, Routledge
- Craig, Robert T., and, Muller, Heidi L., 2007, *Theorizing Communication, Reading Across Tradition*, California, Sage Publication, INC.
- Dahl, Robert A, 1985, *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta, CV Rajawali
- Denton, Jr, Robert E., 2000, *Political Communication Ethics, An Oxyoron?*, USA, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln, 2000, *Handbook of Qualitatif Research*, USA, Sage Publication

- DeVito, Joseph A, 1996, *Human Communication*, New York: Hunter College City University.
- Donsbach, Wolfgang & Michael W. Traugott, 2008, *The SAGE Handbook of Public Opinion Research*, USA, Sage Publications
- Ecip, S. Sinansari, 1989, *NU dalam Tantangan – K.H. As'ad Syamsul Arifin*, Jakarta, Al Kautsar.
- Esser, Frank & Barbara Pfetsch, 2004, *Comparing Political Communication – Theories, Cases, and Challenges*, USA, Cambridge University Press
- Fiellard, Andree, et al, 2010, *Gus Dur – NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta, LKiS
- Forum Demokrasi, 1991, *Sekali Lagi Demokrasi – Kumpulan Pernyataan dan Rekomendasi Soal-Soal Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Forum Demokrasi
- Gamson, William A, 1995, *Talking Politics*, USA, Cambridge University Press
- Gazali, Effendi, et al, 2009, *Political Communication in Indonesia: Media Performance in Three Eras*, dalam Willnat, Lars, and, Aw, Annete, 2009, *Political Communication in Asia*, New York, Routledge.
- Griffin, Em, 2000, *A First Look at Communication Theory – Fourth Edition*, USA: The McGraw Hill Companies.
- Gudykunst, William B, 1983, *Intercultural Communication Theory – Current Perspectives*, USA: Sage Publications.
- Hamid, M, 2010, *Gus Gerr, Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, Yogyakarta, Percetakan Galangpress
- Hardiman, F. Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif – Menimbang 'Negara hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius



- Husaini, Adian, 2010, *Pluralisme Agama – Musuh Agama-Agama* (Pandangan Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam terhadap paham Pluralisme Agama), Jakarta, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.
- Huntington, Samuel P, 2001, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Ida, Laode & A. Thantowi Jauhari, 1999, *Gus Dur – Di antara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Ida, Laode, 2004, *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Khuluq, Lathiful, 2009, *Fajar Kebangkitan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta, LKiS
- Lincoln, Yvonna S. and Guba Egon G, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hill, Sage Publication
- Lindlof, Thomas R, 1995, *Qualitative Communication Research Methods*, USA: Sage Publication.
- Littlejohn, Stephen W, 2005, *Theories of Human Communication Eighth Edition*, USA: Wadworth Publishing Company.
- Manurung, Pappilon H., 2007, *Komunikasi & Kekuasaan*, Yogyakarta, Forum Studi Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Mashum, Saifullah, 1999, *KH. Abdul Wahab, Chasbullah, Perintis, Pendiri dan Penggerak NU*, Jakarta, PanitiaPenulisan Buku Sejarah KH. Abdul Wahab Chasbullah
- McNair, Brian, 2003, *An Introduction To Political Communication*, New York, Routledge.
- Moesa, Ali Maschan, 2007, *Nasionalisme Kiai – Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta, LkiS.

- Miller, Katherine, 2002, *Communication Theories – Perspectives, Processes, and Contexts*; Second Edition, USA, The McGraw Hill Companies.
- , 2005, *Communication Theories – Perspectives, Processes, and Contexts*; Second Edition, USA, The McGraw Hill Companies.
- Misrawi, Zuhairi, 2010, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari – Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta, KOMPAS
- Negrine, Ralph & James Stanyer, 2007, *The Political Communication Reader*, USA, Routledge
- Newman, W. Lawrence, 2000, *Social Research Methods – Qualitative and Quantitative Approaches – Fourth Edition*, USA: A Viacom Company.
- Nimmo, Dan, 1978, *Political Communication and Public Opinion in America*, California, Goodyear Publishing Company
- Ng, Al-Zastrouw, 1999, *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan ? – Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Payne, D, 1990, *Coping with Failure: Theurapeutic Uses of Rhetoric*, Columbia: University of South Carolina Press
- Price, Vincent, 1992, *Communication Concept – Public Opinion*, USA, Sage Publications
- Ramage, Douglas, E, 1993, *Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penrapannya – dalam Era Pasca Asas Tunggal, dalam Gus Dur – NU dan Masyarakat Sipil*, Dharwis, Ellyasa KH, Yogyakarta, LKiS.
- Rasyid, Hamdan, et al, 1999, *K.H. Abdul Wahab Chasbullah – Perintis, Pendiri, dan Penggerak NU*, Jakarta, Panitia Penulisan Buku Sejarah Perjuangan KH Abdul Wahab Chasbullah
- Roberts, Brian, 2002, *Biographical Research*, USA, Open University Press.

- Rogers, Everett M, 1995, *A History of Communication Study – A Biographical Approach*, New York: The Free Press.
- Salim, Hairus, 2000, *Gus Dur dan Kenangan Cendekiawan Zaman Prisma*, dalam Wahid, Abdurrahman, 2000, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta, LKiS
- Samovar, Larry A dan Richard E. Porter, 1990, *Intercultural Communication : A Reader Book Description*, USA: Wadsworth Publishing Company.
- Schroder, Peter, 2005, *Strategi Politik (Politische Strategien)* – Edisi Bahasa Indonesia, Indonesia, Friedrich-Naumann-Stiftung
- Sobur, Alex (2002), *Analisis Teks Media – Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Tancred, H.C. Lawson, 1991, *Aristotle – The Art of Rhetoric*, USA, Penguin Books.
- Thoha, Zainak Arifin, 2010, *Jagadnya Gus Dur – Demokrasi, Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*, Yogyakarta, Kutub
- Turmudi, Endang, 2004, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta, LKiS.
- , 2003, *Nahdlatul Ulama, Ideology Politics and The Formation of Khaira Ummah*, Yogyakarta, PP. Lembaga pendidikan Ma'arif NU.
- Veeger K.J, 1990, *Realitas Sosial – Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta, PT GRAMedia Pustaka Utama
- Watt, James H and Sjef A van den Berg, 1995, *Research Methods for Communication Science*, Boston, USA: Allyn and Bacon..
- Wahid, Abdurrahman, 1998, *Tabayun Gus Dur – Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*, Yogyakarta, LKiS
- , 2010, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta, LKiS

-----, 2010, *Membaca Sejarah Nusantara*, 25  
*Kolom Sejarah Gus Dur*, Yogyakarta, LKiS

### **TESIS DAN DISERTASI**

- Haris, Syamsudin, 2002, Tesis – *Konflik Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dalam Era Transisi Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1999-2001)*
- Prihatin, Yanuar, 2003, Tesis – *Studi Tentang Pemikiran Demokrasi dan Perilaku Politik Abdurrahman Wahid (1984-2001)*.
- Rusfian, Effy Zalviana, 2008, Disertasi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Komunikasi Dalam Situasi Konflik (Studi Perilaku Komunikasi Terhadap Anggota DPR RI di Era Reformasi)*.
- Sonhadji, H. Musthofa, 1987, Tesis – *Nahdlatul Ulama – Organisasi Sosial Kegamaan Tahun 1926-1952 (Suatu Tinjauan Kultural Historis)*
- Soon, Kang Young, 2002, Disertasi – *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitan Nahdlatul Ulama, 1984-1999*.
- Suparno, Basuki Agus, 2010, Disertasi – *Kontestasi Makna dan Dramatisme (Studi Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia)*
- Turmudi, Endang, 2003, Disertasi – *Struggling for the Umma – Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*
- Zen, Fathurin, 2001, Tesis, *Komunikasi dan Konflik Politik Antara Kelompok Islam Tradisional dan Modern – Framing Analisis Terhadap Berita-Berita Mengenai Nahdlatul Ulama Dalam Media Cetak*.

## **JURNAL DAN MAJALAH**

- Wahid, Abdurrahman, 1975, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan* – dalam *Prisma* Edisi 4-Agustus, Jakarta, LP3ES.
- , 1976, *Pesantren, Pendidikan Elitis atau Populis ?* – dalam *Prisma* Edisi 3-Maret, Jakarta, LP3ES.
- , 1977, *Mahdiisme dan Protes Sosial* – dalam *Prisma* Edisi 1-Januari, Jakarta, LP3ES.
- , 1978, *Agamawan dan Pembangunan Desa* – dalam *Tempo* Edisi 1 Juli, Jakarta.
- , 1978, *Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus dari Jombang* – dalam *Prisma* Edisi 4-April, Jakarta, LP3ES.
- , 1978, *Demokrasi Haruslah Diperjuangkan* – dalam *Tempo* Edisi 12 Agustus, Jakarta.
- , 1978, *Golongan Fungsional dan Perlunya Dialog* – dalam *Tempo* Edisi 3 Juni, Jakarta.
- , 1978, *Menilai Kepemimpinan* – dalam *Tempo* Edisi 9 September, Jakarta.
- , 1978, *Irak: Patahnya Beberapa Mitos* – dalam *Tempo* Edisi 14 Oktober, Jakarta.
- , 1978, *Sebuah Perspektif Nasi Tumpeng* – dalam *Tempo* Edisi 13 Agustus, Jakarta.
- , 1979, *Mencari Perspektif Baru dalam Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia* – dalam *Prisma* Edisi 12-Desember, Jakarta, LP3ES.
- , 1979, *Pesantren dan Ludruk* – dalam *Prisma* Edisi 12-Desember, Jakarta, LP3ES.
- , 1980, *Agama, Ideologi, dan Pembangunan* – dalam *Prisma* Edisi 1-Januari, Jakarta, LP3ES.

- , 1980, *Kiai Iskandar dan Pak Damin* – dalam *Tempo* Edisi 4 Oktober, Jakarta.
- , 1980, *Kiai Chasbullah dan Musuhnya* – dalam *Tempo* Edisi 7 Juni, Jakarta.
- , 1980, *Salahkah Jika Dipribumikan?* – dalam *Tempo* Edisi 19 Juli, Jakarta.
- , 1981, *Islam dan Militerisme dalam Lintasan Sejarah* – dalam *Prisma* Edisi 12-Desember, Jakarta, LP3ES.
- , 1981, *Melawan melalui Lelucon* – dalam *Tempo* Edisi 19 Desember, Jakarta.
- , 1981, *Fatwa Natal: Ujung dan Pangkal* – dalam *Tempo* Edisi 30 Mei, Jakarta.
- , 1982, *Jangan Paksakan Paradigma Luar terhadap Agama* – dalam *Prisma* Edisi 9-September, Jakarta, LP3ES.
- , 1982, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* – dalam *Tempo* Edisi 26 Juni, Jakarta, LP3ES.
- , 1983, *Republik Bumi di Surga – Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat* – dalam *Prisma* Edisi 10-Oktober, Jakarta, LP3ES.
- , 1983, *Islam: Punyakah Konsep Kenegaraan?* – dalam *Tempo* Edisi 26 Maret, Jakarta.
- , 1983, *Sekuler Tidak Sekuler* – dalam *Tempo* Edisi 3 September, Jakarta.
- , 1983, *Akademi Betawi* – dalam *Tempo* Edisi 26 Nopember, Jakarta.
- , 1983, *Kwitang – Kwitang !* – dalam *Tempo* Edisi 1 Januari, Jakarta.
- , 1983, *Lagu Jawa di Restoran Padang* – dalam *Tempo* Edisi 7 April, Jakarta.
- , 1983, *Orang Karo dan Kebanggaannya* – dalam *Tempo* Edisi 13 Agustus, Jakarta.

----- , 1985, *Persaingan di Bawah Justru Lebih Hebat* – dalam *Prisma* Edisi 2-Februari, Jakarta, LP3ES.

----- , 1985, *Reideologisasi dan Retradisionalisasi dalam Politik* – dalam *Prisma* Edisi 6-Juni, Jakarta, LP3ES.

----- , 1991, *Intelektual di Tengah Eksklusivisme* – dalam *Prisma* Edisi 3-Maret, Jakarta, LP3ES.

----- , 1995, *Politik sebagai Moral, Bukan Institusi* – dalam *Prisma* Edisi 5-Mei, Jakarta, LP3ES.

### **PAPER**

Ismartono, SJ, 2005, *Tinjauan Teoritis dan Filosofis tentang Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian*, dalam Seminar Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian, Kamis, 16 Juni 2005 di Sorong